



UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MODUL AJAR · BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

3KKFS052 · 3 sks · Semester 3

Kurikulum 2023

Tim Penyusun

Darmawaty A Razak, S.IP., M.AP.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO · 2023

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

IDENTITAS MODUL

Unsur	Keterangan
Nama mata kuliah	Sosiologi Pemerintahan
Kode mata kuliah	3KKFS052
Bobot	3 sks (Teori = 3, Praktikum = 0)
Semester	3 (tiga)
Rumpun/kelompok MK	MKWF (sesuai RPS)
Mata kuliah prasyarat	Tidak ada
Program studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN)
Kurikulum	Kurikulum OBE 2023
CPL yang dibebankan	CPL-02, CPL-03, CPL-06
CPMK	CPMK1–CPMK3
Jumlah unit modul	6 unit (satu unit untuk setiap Sub-CPMK) + Bab Asesmen Sumatif
Bahan kajian	Dasar ilmu sosial, politik, dan filsafat ilmu; konsep dasar sosiologi pemerintahan; struktur sosial dan relasi kuasa; legitimasi dan institusi pemerintahan; teori dan sistem pemerintahan; fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik; sistem pemerintahan daerah dan desa; hubungan pusat–daerah di KTI; kelembagaan lokal dan demokrasi akar rumput; partisipasi masyarakat dan mobilisasi sosial; dinamika kepemiluan dan kontestasi lokal; gerakan sosial dan kekuasaan lokal
Model pembelajaran	Project-Based Learning (PjBL) berbasis studi kasus lapangan, dipadukan dengan Case-Based Learning individual, bauran luring–daring melalui LMS UNISAN
Beban belajar per minggu	Pembelajaran terbimbing 3 × 50 menit, penugasan terstruktur 3 × 60 menit, belajar mandiri 3 × 60 menit
Dokumen acuan	RPS Sosiologi Pemerintahan (RPS-3KKFS052) Kurikulum 2023
Tim penyusun	Darmawaty A Razak, S.IP., M.AP. (NIDN 0924076701)
Tahun penyusunan	2023

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Unsur	Keterangan
Judul modul	Modul Ajar Sosiologi Pemerintahan Berbasis Outcome-Based Education
Mata kuliah / kode	Sosiologi Pemerintahan / 3KKFS052
Bobot / semester	3 sks / semester 3
Program studi	Ilmu Pemerintahan (S1), FISIP UNISAN

Modul ajar ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai bahan ajar pada mata kuliah Sosiologi Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, ... 2023

Penyusun,

Koordinator Rumpun Mata Kuliah,

Darmawaty A Razak, S.IP., M.AP.

NIDN 0924076701

.....

NIDN

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

.....

NIDN

.....

NIDN

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Ajar Sosiologi Pemerintahan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai pendamping Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Sosiologi Pemerintahan (3KKFS052) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Kurikulum 2023.

Sosiologi Pemerintahan menjembatani ilmu sosiologi dan ilmu pemerintahan: mahasiswa diajak memahami bahwa lembaga pemerintahan bukan sekadar struktur formal, melainkan hasil relasi sosial, kuasa, dan legitimasi yang terus dinegosiasikan oleh masyarakat. Penekanan khusus diberikan pada konteks Kawasan Timur Indonesia (KTI), tempat hubungan pusat–daerah, kelembagaan desa, partisipasi warga, dan kontestasi politik lokal memiliki dinamika yang khas.

Modul ini mengikuti rantai capaian pembelajaran OBE: dari tiga CPL yang dibebankan, diturunkan menjadi tiga CPMK dan enam Sub-CPMK yang masing-masing menjadi satu unit belajar. Sepanjang semester, mahasiswa mengerjakan tugas individual mingguan yang berjenjang serta Final Project kelompok (3–4 mahasiswa) berupa studi kasus terpadu tentang dinamika pemerintahan lokal di satu kabupaten/kota atau desa/kelurahan di Kawasan Timur Indonesia, yang dilaporkan melalui laporan riset, poster akademik, dan presentasi oral. Rangkaian belajar semester ditutup dengan makalah akhir individual yang mengintegrasikan seluruh capaian pembelajaran.

Nilai-nilai institusional UNISAN, yaitu ICHSA-N (*Integrity, Creativity, Harmony, Service, Adaptability, Nationalism*), diintegrasikan ke dalam aktivitas belajar dan penilaian, termasuk integritas dalam penggunaan data lapangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial generatif (GenAI) secara bertanggung jawab.

Tim penyusun menyadari bahwa modul ini masih dapat disempurnakan. Masukan dari mahasiswa, dosen, dan pimpinan program studi sangat diharapkan melalui kuesioner umpan balik pada bagian lampiran.

Gorontalo, ... 2023

Tim Penyusun

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

DAFTAR ISI

Identitas Modul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Petunjuk Penggunaan Modul	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah.....	1
1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah.....	1
1.3 Capaian Pembelajaran	2
1.4 Matriks Keterkaitan.....	3
1.5 Peta Alur Belajar	5
1.6 Strategi Pembelajaran dan Final Project	7
1.7 Sistem Penilaian	9
1.8 Ketuntasan Belajar	10
BAB II KONSEP DASAR DAN PERSPEKTIF TEORETIS SOSIOLOGI PEMERINTAHAN	12
BAB III LEGITIMASI DAN INSTITUSI PEMERINTAHAN.....	21
BAB IV HUBUNGAN PUSAT–DAERAH DAN KELEMBAGAAN LOKAL.....	29
BAB V DEMOKRASI AKAR RUMPUT DI DESA KAWASAN TIMUR INDONESIA.....	37
BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MOBILISASI SOSIAL.....	45
BAB VII KEPEMILUAN, KLIENELISME, DAN GERAKAN SOSIAL.....	54
BAB VIII ASESMEN SUMATIF	63
8.1 Prinsip Asesmen	63
8.2 Rekonsiliasi Komponen Penilaian dan Sub-CPMK	63
8.3 Perhitungan Nilai dan Ketercapaian untuk SI-OBE.....	64
8.4 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UTS	66
8.5 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UAS.....	67
8.6 Rubrik Tugas Lain.....	68
8.7 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan.....	70
GLOSARIUM	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	74
Lampiran A. Templat Kerja.....	74
Lampiran B. Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas	76
Lampiran C. Kuesioner Umpan Balik Modul	77

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**A. Petunjuk bagi Mahasiswa**

1. Bacalah Bab I secara utuh pada minggu pertama agar Anda memahami capaian pembelajaran, alur belajar, Final Project, dan cara penilaian.
2. Pelajari unit sesuai jadwal mingguan. Unit 5 dipelajari sepanjang minggu 9–12 dan Unit 6 sepanjang minggu 13–15.
3. Kerjakan aktivitas daring di LMS UNISAN **sebelum** sesi luring; sesi tatap muka digunakan untuk diskusi kasus, pemetaan konsep kolaboratif, dan presentasi.
4. Jawablah pertanyaan pada kotak **Pemantik** dan **Studi Kasus** secara tertulis sebagai portofolio.
5. Kerjakan **Latihan** tanpa melihat kunci jawaban, lalu hitung tingkat penguasaan Anda (subbab 1.8).
6. Bentuk kelompok Final Project (3–4 mahasiswa) pada minggu 1, sepakati lokus kabupaten/kota atau desa/kelurahan di KTI, dan ikuti tahapan proyek pada subbab 1.6.
7. Susun makalah akhir individual (3.000–4.000 kata) secara bertahap sejak minggu 15; jangan menunda penulisannya hingga minggu 16.

B. Petunjuk bagi Dosen

1. Gunakan modul ini bersama RPS Sosiologi Pemerintahan (RPS-3KKFS052). Bobot Sub-CPMK, penempatan minggu, dan komponen penilaian mengikuti keputusan penyelarasan pada subbab 1.6 dan 1.7.
2. Setujui komposisi kelompok Final Project (3–4 mahasiswa) dan lokus kabupaten/kota atau desa/kelurahan paling lambat akhir minggu 1.
3. Siapkan panduan wawancara/observasi lapangan generik sebagai contoh sebelum minggu 7–9 agar mahasiswa tidak memulai dari nol.
4. Jadwalkan sesi presentasi dan sidang final kelompok pada minggu 15; sediakan waktu memadai bila jumlah kelompok banyak.
5. Rekam nilai per Sub-CPMK ke SI-OBE UNISAN sesuai tabel rekonsiliasi pada Bab Asesmen Sumatif.

C. Etika Akademik, Etika Data, dan Pemanfaatan GenAI

Norma akademik berikut berlaku bagi seluruh tugas, Final Project, kuis, dan ujian, mengikuti Norma Akademik pada RPS.

- Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit.
- Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.

- Integritas akademik ditegakkan penuh — plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
- Data primer dari narasumber/subjek penelitian dijaga kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
- GenAI boleh digunakan sebagai alat bantu eksplorasi, tetapi setiap penggunaan wajib dinyatakan dalam **Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas** (lampiran); GenAI dilarang selama kuis, UTS, dan UAS kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
- Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen; komunikasi dosen–mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi).

D. Penanda Kotak Berwarna

Modul ini menggunakan kotak berwarna untuk membedakan fungsi setiap bagian. Kenali penandanya agar Anda dapat memindai isi modul dengan cepat.

Contoh	Kotak	Ciri visual	Fungsi
	Sub-CPMK	Latar lila, garis kiri ungu	Kemampuan akhir unit dan indikatornya, dikutip persis dari RPS.
	Pemantik / Ayo Diskusi	Bingkai toska	Pertanyaan pembuka untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan memicu diskusi.
	Studi Kasus	Latar toska muda, garis kiri toska	Kasus ilustrasi berikut pertanyaan analisis.
	Aktivitas Pembelajaran	Latar navy muda, garis kiri navy	Kegiatan luring, daring (LMS), dan luaran setiap minggu.
	Latihan	Bingkai navy	Soal untuk mengukur penguasaan unit.
	Refleksi	Latar ungu pucat, garis kiri lembayung	Pertanyaan untuk menilai proses belajar diri sendiri.
	Nilai ICHSA-N	Blok navy, teks putih	Pengaitan materi dengan nilai institusional UNISAN.
	Persiapan UTS/UAS	Latar toska muda, bingkai toska tua	Ringkasan cakupan dan strategi menghadapi ujian.

BAB I · PENGANTAR MATA KULIAH

I

PENDAHULUAN

Peta jalan belajar Sosiologi Pemerintahan selama satu semester

CPMK1–CPMK3

CPL-02 · CPL-03 · CPL-06

3 sks · 16 minggu

■ 1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah Sosiologi Pemerintahan (3 sks) mengkaji relasi antara struktur sosial dan institusi pemerintahan dengan menggunakan kerangka teoretis fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik sebagai landasan analisis gejala pemerintahan di masyarakat.

Mata kuliah ini memosisikan diri sebagai jembatan antara ilmu sosiologi dan ilmu pemerintahan: mahasiswa menjelaskan konsep dasar seperti legitimasi, relasi kuasa, dan kelembagaan pemerintahan, kemudian menerapkannya secara progresif pada analisis empiris hubungan pusat–daerah, demokrasi akar rumput, partisipasi masyarakat, dan kontestasi politik di tingkat lokal, dengan perhatian khusus pada konteks Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Mata kuliah ini relevan dengan CPL-02 (konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu), CPL-03 (sistem pemerintahan Indonesia dan hubungan pusat–daerah), dan CPL-06 (dinamika politik, kekuasaan, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat).

■ 1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah

Sosiologi Pemerintahan merupakan mata kuliah keahlian pada semester 3 tanpa prasyarat formal. Mata kuliah ini menjadi jembatan konseptual antara ilmu sosiologi, ilmu politik, dan filsafat ilmu di satu sisi, dengan mata kuliah analisis kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang lebih lanjut di sisi lain.

Pemahaman tentang legitimasi, relasi kuasa, dan kelembagaan pemerintahan yang dibangun pada mata kuliah ini menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk menganalisis fenomena pemerintahan secara kritis, tidak semata dari sudut pandang normatif-hukum, melainkan juga dari dinamika sosial yang menyertainya. Kompetensi ini dibutuhkan oleh aparat pemerintah daerah dan desa, peneliti sosial-politik, jurnalis, dan pegiat masyarakat sipil, terutama di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki keragaman struktur sosial dan kelembagaan lokal.

Nilai ICHSA-N diintegrasikan ke dalam aktivitas belajar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Integrasi Nilai ICHSA-N dalam Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan

Nilai	Makna dalam mata kuliah	Wujud dalam aktivitas dan penilaian
Integrity	Kejujuran data lapangan dan analisis	Transkrip wawancara/observasi dilampirkan apa adanya; larangan fabrikasi data pada Final Project dan tugas individual

Nilai	Makna dalam mata kuliah	Wujud dalam aktivitas dan penilaian
Creativity	Kreativitas dalam membaca fenomena sosial-pemerintahan	Penerapan lebih dari satu perspektif teoretis pada satu kasus; rekomendasi kebijakan inovatif pada Final Project
Harmony	Menghargai keragaman struktur sosial dan kearifan lokal	Studi kasus dan wawancara yang menghormati konteks budaya lokal KTI
Service	Keberpihakan pada penguatan tata kelola dan keadilan sosial	Rekomendasi kebijakan Final Project berorientasi pada penguatan partisipasi dan legitimasi pemerintahan lokal
Adaptability	Menyesuaikan analisis dengan konteks daerah 3T	Studi kasus lintas daerah KTI (pesisir, kepulauan, terpencil) dengan pendekatan yang disesuaikan
Nationalism	Kepedulian pada pemerataan tata kelola pemerintahan	Lokus Final Project dan studi lapangan di desa/kelurahan/kabupaten-kota Kawasan Timur Indonesia

■ 1.3 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran disusun berjenjang: tiga CPL yang dibebankan (Tabel 1.2) dijabarkan menjadi tiga CPMK (Tabel 1.3), lalu dirinci menjadi enam Sub-CPMK yang menjadi kemampuan akhir setiap unit (Tabel 1.4).

Tabel 1.2 CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan
CPL-02	Menguasai konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu sebagai landasan menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan serta politik.
CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
CPL-06	Mampu menganalisis dinamika politik, kekuasaan, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat pada aras lokal, nasional, maupun global.

Tabel 1.3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPL terkait
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi pemerintahan — mencakup struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, dan institusi pemerintahan — beserta kerangka teoretis utama (fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik) sebagai landasan analisis gejala pemerintahan di masyarakat.	CPL-02
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis pola relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia, termasuk dinamika hubungan pusat–daerah, kelembagaan lokal, dan praktik demokrasi akar rumput, melalui studi kasus berbasis data empiris.	CPL-03

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPL terkait
CPMK3	Mahasiswa mampu mengevaluasi fenomena partisipasi masyarakat, mobilisasi sosial, dan dinamika kekuasaan lokal — termasuk isu pemilihan, gerakan sosial, dan kontestasi politik di tingkat daerah — dengan menghasilkan laporan analisis kritis yang menyajikan argumen berbasis teori sosiologi pemerintahan dan bukti lapangan.	CPL-06

Tabel 1.4 Sub-CPMK, CPMK Induk, dan Minggu Pembelajaran

Kode	Sub-CPMK (kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	CPMK	Minggu
Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi pemerintahan — struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, dan institusi pemerintahan — serta memetakan kerangka teoretis fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik dalam satu matriks perbandingan.	CPMK1	1–2
Sub-CPMK2	Mengaplikasikan kerangka teoretis sosiologi pemerintahan untuk menganalisis gejala pemerintahan konkret di Indonesia — khususnya isu legitimasi dan institusi — melalui telaah kasus tertulis minimal 1.500 kata.	CPMK1	3–4
Sub-CPMK3	Menganalisis dinamika hubungan pusat–daerah dan kelembagaan lokal di Kawasan Timur Indonesia dengan membandingkan minimal dua daerah/kasus berdasarkan data empiris sekunder (dokumen kebijakan, laporan resmi, atau hasil riset terpublikasi).	CPMK2	5–6
Sub-CPMK4	Mengevaluasi praktik demokrasi akar rumput dan pola relasi sosial antara pemerintah desa dengan masyarakat di satu desa/kelurahan di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus berbasis observasi lapangan atau wawancara minimal 5 informan.	CPMK2	7
Sub-CPMK5	Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan faktor pendorong mobilisasi sosial dalam konteks pemerintahan lokal dengan mengklasifikasikan tipologi partisipasi berdasarkan minimal dua kasus nyata di Indonesia.	CPMK3	9–12
Sub-CPMK6	Mengevaluasi dinamika kekuasaan lokal dalam konteks pemilihan dan kontestasi politik daerah — termasuk praktik klientelisme, politik identitas, atau patronase — dengan menyajikan analisis kritis berbasis teori sosiologi pemerintahan dan bukti lapangan.	CPMK3	13–15

Penempatan minggu Sub-CPMK5 (9–12) dan Sub-CPMK6 (13–15) mengikuti jumlah minggu pada matriks CPL RPS. Isi mingguan RPS memberi label eksplisit "Sub-CPMK6" pada minggu 11–13 (topik pemilihan/klientelisme); modul ini menyelaraskannya dengan menempatkan pendalaman tipologi partisipasi pada minggu 11–12 (Unit 5) dan memampatkan topik pemilihan, klientelisme, serta gerakan sosial ke dalam tiga minggu Unit 6 (13–15). Minggu 8 (UTS) dan minggu 16 (UAS) merupakan minggu evaluasi sumatif.

■ 1.4 Matriks Keterkaitan

Matriks berikut menunjukkan keselarasan konstruktif antara Sub-CPMK, CPMK, CPL, dan unit modul. Bobot pada Tabel 1.6 mengikuti tabel rekonsiliasi komponen penilaian RPS (subbab 1.7), bukan matriks CPL versi awal, sesuai keputusan penyelarasan; proporsi CPL per Sub-CPMK diturunkan secara proporsional dari matriks CPL awal RPS.

Tabel 1.5 Matriks Sub-CPMK × CPMK

Sub-CPMK	CPMK1	CPMK2	CPMK3
Sub-CPMK1	√		
Sub-CPMK2	√		
Sub-CPMK3		√	
Sub-CPMK4		√	
Sub-CPMK5			√
Sub-CPMK6			√
Jumlah Sub-CPMK	2	2	2
Bobot CPMK (%)	28	37	35

Tabel 1.6 Matriks CPL × Sub-CPMK dan Bobot Penilaian (%)

Sub-CPMK	CPL-02	CPL-03	CPL-06	Bobot (%)	Minggu
Sub-CPMK1	15			15	1–2
Sub-CPMK2	13			13	3–4
Sub-CPMK3		10	10	20	5–6
Sub-CPMK4		10	7	17	7
Sub-CPMK5	10		10	20	9–12
Sub-CPMK6		8	7	15	13–15
Jumlah	38	28	34	100	14 minggu

Bobot Sub-CPMK mengikuti tabel rekonsiliasi komponen penilaian RPS (15/13/20/17/20/15), bukan matriks CPL awal (14/14/14/7/29/22) — lihat keterangan penyelarasan pada subbab 1.7. Proporsi CPL-02/03/06 per Sub-CPMK diturunkan proporsional dari matriks CPL awal RPS terhadap bobot baru.

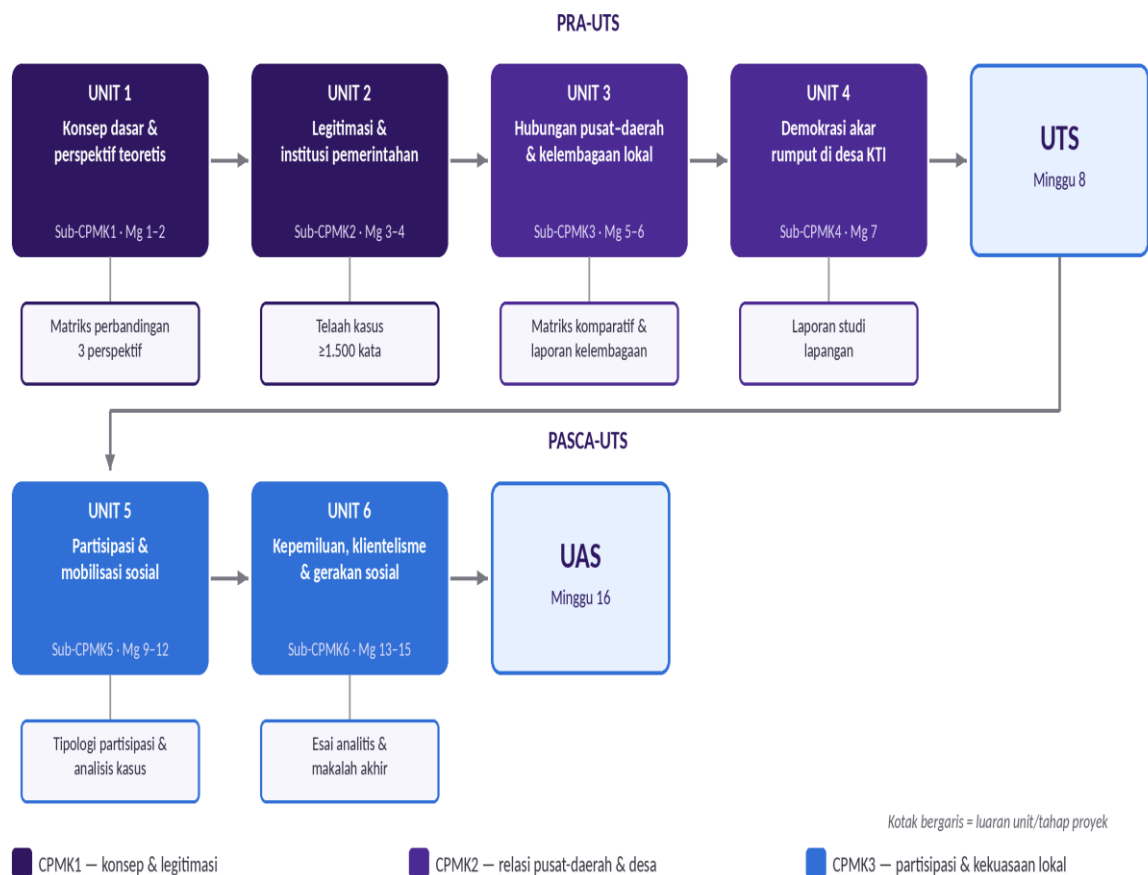
Tabel 1.7 Peta Unit Modul

Bab / Unit	Judul unit	Sub-CPMK	CPMK	Minggu	Bobot (%)
Bab II / Unit 1	Konsep Dasar dan Perspektif Teoretis Sosiologi Pemerintahan	Sub-CPMK1	CPMK1	1–2	15
Bab III / Unit 2	Legitimasi dan Institusi Pemerintahan	Sub-CPMK2	CPMK1	3–4	13
Bab IV / Unit 3	Hubungan Pusat–Daerah dan Kelembagaan Lokal	Sub-CPMK3	CPMK2	5–6	20
Bab V / Unit 4	Demokrasi Akar Rumput di Desa Kawasan Timur Indonesia	Sub-CPMK4	CPMK2	7	17
Minggu 8 — Ujian Tengah Semester (UTS): Sub-CPMK1–Sub-CPMK4					
Bab VI / Unit 5	Partisipasi Masyarakat dan Mobilisasi Sosial	Sub-CPMK5	CPMK3	9–12	20

Bab / Unit	Judul unit	Sub-CPMK	CPMK	Minggu	Bobot (%)
Bab VII / Unit 6	Kepemiluan, Klientelisme, dan Gerakan Sosial	Sub-CPMK6	CPMK3	13–15	15
Minggu 16 — Ujian Akhir Semester (UAS): seluruh materi dengan penekanan minggu 9–15, termasuk pengumpulan makalah akhir individual					
Bab VIII — Asesmen Sumatif (rekonsiliasi penilaian, kisi-kisi dan contoh naskah UTS/UAS, rubrik, perhitungan SI-OBE)					

■ 1.5 Peta Alur Belajar

Gambar 1.1 menunjukkan alur belajar selama satu semester. Warna kotak menandai CPMK induk setiap unit, sedangkan kotak bergaris di bawahnya menunjukkan luaran unit. Unit 1–4 dievaluasi melalui UTS; UAS mencakup seluruh materi dengan penekanan pada Unit 5–6. Final Project kelompok berjalan sejak minggu 1 hingga minggu 15 melintasi Unit 2–6 (lihat subbab 1.6).



Gambar 1.1 Peta Alur Belajar Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan

■ 1.6 Strategi Pembelajaran dan Final Project

Setiap minggu terdiri atas **pembelajaran terbimbing (PB)** 3 × 50 menit, **penugasan terstruktur (PT)** 3 × 60 menit, dan **kegiatan mandiri (KM)** 3 × 60 menit, atau 510 menit (8,5 jam) per minggu. Pola umum setiap unit adalah kegiatan daring di LMS sebelum sesi, kegiatan luring berupa diskusi kasus,

pemetaan konsep kolaboratif, atau presentasi, serta penugasan individual mingguan yang berjenjang, berdampingan dengan tahapan Final Project kelompok.

Tabel 1.8 Beban Belajar dan Luaran per Minggu

Mg	Unit / Sub-CPMK	Pokok bahasan	PB	PT	KM	Luaran utama
1	Unit 1 / Sub-CPMK1	Posisi sosiologi pemerintahan dan pemetaan konsep dasar	150'	180'	180'	Matriks perbandingan awal (individu); pembentukan kelompok Final Project
2	Unit 1 / Sub-CPMK1	Fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik	150'	180'	180'	Matriks perbandingan final (individu); penetapan lokus & proposal singkat kelompok
3	Unit 2 / Sub-CPMK2	Legitimasi dan krisis institusional	150'	180'	180'	Draf telaah kasus ≥1.500 kata (individu)
4	Unit 2 / Sub-CPMK2	Revisi telaah kasus dan evaluasi sejawat	150'	180'	180'	Telaah kasus final + evaluasi sejawat (individu); draf kerangka konseptual kelompok
5	Unit 3 / Sub-CPMK3	Hubungan pusat–daerah dan otonomi daerah	150'	180'	180'	Matriks komparatif dua kasus KTI (individu)
6	Unit 3 / Sub-CPMK3	Kelembagaan lokal dan demokrasi akar rumput	150'	180'	180'	Laporan analisis kelembagaan lokal (individu); instrumen lapangan kelompok disiapkan
7	Unit 4 / Sub-CPMK4	Praktik demokrasi akar rumput di desa KTI	150'	180'	180'	Laporan studi kasus lapangan (individu); kelompok memulai pengumpulan data lapangan
8	UTS	Integrasi materi minggu 1–7	150'	180'	180'	Lembar jawaban UTS
9	Unit 5 / Sub-CPMK5	Tipologi partisipasi masyarakat	150'	180'	180'	Tabel klasifikasi tipologi partisipasi (individu); kelompok melanjutkan pengumpulan data lapangan
10	Unit 5 / Sub-CPMK5	Faktor pendorong mobilisasi sosial	150'	180'	180'	Laporan analisis kasus mendalam (individu); transkrip/catatan lapangan kelompok diserahkan
11	Unit 5 / Sub-CPMK5	Pendalaman tipologi partisipasi: studi kasus lintas daerah KTI	150'	180'	180'	Diskusi kelompok kecil dan pembahasan kasus tambahan (individu)
12	Unit 5 / Sub-CPMK5	Sintesis partisipasi dan mobilisasi; jembatan menuju kekuasaan lokal	150'	180'	180'	Refleksi tertulis singkat (individu); draf bab analisis kelompok dikonsultasikan
13	Unit 6 / Sub-CPMK6	Klientelisme, patronase, dan politik identitas	150'	180'	180'	Peta konsep dinamika kepemiluan (individu/berpasangan)

Mg	Unit / Sub-CPMK	Pokok bahasan	PB	PT	KM	Luaran utama
14	Unit 6 / Sub-CPMK6	Kepemiluan daerah dan gerakan sosial lokal	150'	180'	180'	Esai analitis individual; draf laporan terpadu kelompok untuk umpan balik dosen
15	Unit 6 / Sub-CPMK6	Sintesis semester dan persiapan makalah akhir	150'	180'	180'	Draf ringkasan makalah akhir (individu); finalisasi laporan, poster, dan presentasi/sidang final kelompok
16	UAS	Evaluasi akhir semester	150'	180'	180'	Makalah akhir individual (3.000–4.000 kata); lembar jawaban UAS

PB = pembelajaran terbimbing; PT = penugasan terstruktur; KM = kegiatan mandiri (menit per minggu). Total beban semester $16 \times 510 \text{ menit} = 136 \text{ jam}$. Luaran bercetak tebal merupakan tahapan Final Project kelompok atau makalah akhir individual.

1.6.1 Final Project

Final Project berjudul "**Memetakan dan Mengevaluasi Dinamika Pemerintahan Lokal di Kawasan Timur Indonesia — Studi Kasus Terpadu Relasi Pusat–Daerah, Demokrasi Akar Rumput, dan Kontestasi Kekuasaan**" dikerjakan kelompok beranggotakan 3–4 mahasiswa yang dibentuk pada minggu 1; komposisi anggota disetujui dosen. Proyek mengintegrasikan analisis teoretis sosiologi pemerintahan dengan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi lapangan atau wawancara mendalam terhadap minimal 5 informan kunci pada satu kabupaten/kota atau desa/kelurahan di Kawasan Timur Indonesia (diutamakan Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, atau Papua).

Tabel 1.9 Tahapan dan Luaran Final Project

Langkah	Minggu	Kegiatan dan luaran kelompok
1	1–3	Konsolidasi konsep: merumuskan pertanyaan riset, menyusun matriks perbandingan tiga kerangka teori, menetapkan lokus dan fokus studi. Luaran: proposal singkat (1–2 hal.) .
2	4–6	Analisis teoretis & perancangan riset: menyusun kerangka konseptual tertulis, merancang panduan wawancara/observasi lapangan, mengidentifikasi dokumen kebijakan sekunder. Luaran: draf kerangka konseptual .
3	7–9	Pengumpulan data lapangan: wawancara mendalam (≥ 5 informan) dan/atau observasi lapangan, dokumen kebijakan dan laporan resmi sebagai data sekunder. Luaran: transkrip/catatan lapangan .
4	10–11	Analisis komparatif & klasifikasi: membandingkan minimal dua daerah, mengklasifikasikan tipologi partisipasi dan faktor mobilisasi sosial. Luaran: draf bab analisis .
5	12–13	Evaluasi & sintesis: mengevaluasi demokrasi akar rumput dan dinamika kekuasaan lokal, menyintesis temuan, merumuskan rekomendasi kebijakan. Luaran: draf laporan lengkap .
6	14	Finalisasi luaran: menyempurnakan laporan sesuai umpan balik dosen, merancang poster akademik (A1 bilingual), menyiapkan slide presentasi.
7	15	Presentasi & sidang final: presentasi oral (15 menit paparan + 10 menit tanya jawab) di depan dosen dan mahasiswa. Luaran: laporan final, poster, dan rekaman video presentasi .

Luaran akhir Final Project: (1) Laporan Riset Terpadu minimal 5.000 kata; (2) transkrip/catatan lapangan (≥ 5 informan); (3) poster akademik A1 bilingual Indonesia–Inggris; (4) slide presentasi oral (PDF); (5) rekaman video presentasi (MP4, minimal 15 menit).

KETENTUAN FINAL PROJECT

- Kontribusi individu diverifikasi melalui lembar kontribusi yang ditandatangani seluruh anggota; kontribusi individu dapat menggeser nilai individu maksimal $\pm 10\%$ dari nilai kelompok.
- Keterlambatan pengumpulan laporan/poster dikenai pengurangan 5 poin per hari kalender (maksimal 3 hari; lewat batas tidak dinilai kecuali ada dispensasi tertulis dari Wakil Dekan Akademik).
- Seluruh data lapangan (transkrip, catatan observasi, dokumen) dilampirkan sebagai bukti empiris dalam format digital yang dapat diverifikasi; fabrikasi data atau plagiarisme ditangani sesuai Peraturan Akademik UNISAN dan berakibat nilai 0 pada komponen bersangkutan.
- Mahasiswa dengan lokus studi di daerah 3T/terpencil di KTI didorong mengutamakan kolaborasi dengan pemerintah desa setempat sebagai wujud nilai Service dan Nationalism ICHSA-N.

1.7 Sistem Penilaian

RPS mencantumkan lima komponen penilaian (Tugas Analisis Kasus 20%, Kuis Teori 15%, UTS 25%, Studi Lapangan 15%, UAS 25%) beserta tabel rekonsiliasi terhadap bobot Sub-CPMK. Karena Final Project menggantikan sebagian besar tugas individual Sub-CPMK2–6 yang semula dipetakan ke komponen Tugas Analisis Kasus dan Studi Lapangan, modul ini menggabungkan kedua komponen tersebut menjadi satu komponen **Final Project (35%)**, dinilai melalui rubrik kriteria a–g pada Bab Asesmen Sumatif dan didistribusikan ke Sub-CPMK2–6 secara proporsional. Kuis Teori, UTS, dan UAS tetap menilai capaian individual sebagaimana RPS.

Tabel 1.10 Komponen Penilaian dan Pemetaannya ke Sub-CPMK (setelah penggabungan Final Project)

No	Komponen	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur (bobot)	Bentuk dan waktu
1	Kuis Teori	15	Sub-CPMK1 (8), Sub-CPMK3 (7)	Kuis klasifikasi konsep (mg 1), kuis tulis singkat (mg 3)
2	Final Project	35	Sub-CPMK2 (7), Sub-CPMK3 (7), Sub-CPMK4 (8), Sub-CPMK5 (6), Sub-CPMK6 (7)	Laporan riset terpadu, data lapangan, poster, dan presentasi (mg 1–15), kelompok
3	UTS	25	Sub-CPMK1 (7), Sub-CPMK2 (6), Sub-CPMK3 (6), Sub-CPMK5 (6)	Ujian tertulis (mg 8)
4	UAS	25	Sub-CPMK4 (9), Sub-CPMK5 (8), Sub-CPMK6 (8)	Ujian tertulis seluruh materi dengan penekanan minggu 9–15, termasuk makalah akhir individual (mg 16)

No	Komponen	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur (bobot)	Bentuk dan waktu
	Jumlah	100		

Nilai Final Project (0–100) yang sama didistribusikan ke lima sel Sub-CPMK2–6 secara proporsional terhadap bobot masing-masing sel; lihat perhitungan pada Bab Asesmen Sumatif. Rincian rekonsiliasi lengkap terhadap tabel asli RPS disajikan pada Bab Asesmen Sumatif subbab 8.2.

Nilai akhir dalam skala 0–100 dikonversi menurut ketentuan UNISAN untuk program sarjana (Tabel 1.11).

Tabel 1.11 Konversi Nilai Program Sarjana UNISAN

Nilai akhir (skala 100)	Huruf mutu	Bobot
85,00 – 100,00	A	4,00
75,00 – 84,99	B	3,00
65,00 – 74,99	C	2,00
50,00 – 64,99	D	1,00
0,00 – 49,99	E	0,00

■ 1.8 Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar diukur pada tingkat unit. Setelah mengerjakan latihan pada setiap unit, hitunglah tingkat penguasaan Anda dengan rumus berikut.

RUMUS TINGKAT PENGUASAAN

$$\text{Tingkat penguasaan (\%)} = (\text{skor yang diperoleh} \div \text{skor maksimum}) \times 100\%$$

Skor maksimum latihan setiap unit adalah 100 (lima soal pilihan ganda $\times$ 10 dan dua soal uraian $\times$ 25), atau jumlah skor daftar periksa untuk unit berluaran laporan lapangan atau presentasi. Ambang ketuntasan ditetapkan **70%**.

Tabel 1.12 Tindak Lanjut Berdasarkan Tingkat Penguasaan

Tingkat penguasaan	Kategori	Tindak lanjut
$\geq 90\%$	Sangat baik	Lanjutkan ke unit berikutnya dan kerjakan kegiatan pengayaan pada unit tersebut.
70% – 89%	Tuntas	Lanjutkan ke unit berikutnya; pelajari kembali bagian yang jawabannya belum tepat.
$< 70\%$	Belum tuntas	Ikuti kegiatan remedial: baca ulang uraian materi yang terkait, diskusikan kesulitan di forum LMS atau saat konsultasi, lalu kerjakan kembali latihan hingga mencapai 70%.

Ambang yang sama (nilai Sub-CPMK ≥ 70) digunakan dalam SI-OBE untuk menyatakan bahwa seorang mahasiswa telah mencapai Sub-CPMK, CPMK, dan CPL yang bersangkutan.

REFLEKSI AWAL

Sebelum memulai Unit 1, jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan simpan jawabannya di portofolio Anda. Anda akan membandingkannya kembali di akhir semester.

1. Menurut Anda, apakah pemerintah desa/kelurahan di lingkungan Anda dianggap sah (legitimate) oleh warganya? Apa yang membuat Anda berpendapat demikian?
2. Pernahkah Anda menyaksikan atau mendengar praktik klientelisme atau politik identitas dalam pemilu di daerah Anda? Bagaimana dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan?
3. Kemampuan apa yang paling ingin Anda kuasai dari mata kuliah ini, dan bagaimana Anda akan mengatur waktu belajar 8,5 jam per minggu di tengah tugas individual dan Final Project?

BAB II · UNIT 1 · MINGGU 1–2

01 KONSEP DASAR DAN PERSPEKTIF TEORETIS SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, dan tiga perspektif teoretis utama

Sub-CPMK1

CPL-02

Bobot 15%

■ 2.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK1

Menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi pemerintahan — struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, dan institusi pemerintahan — serta memetakan kerangka teoretis fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik dalam satu matriks perbandingan.

Indikator: mahasiswa mampu

- Menjelaskan perbedaan objek kajian sosiologi, ilmu politik, dan filsafat ilmu secara tepat dalam tabel komparasi
- Mengidentifikasi konsep struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, dan institusi pemerintahan dari minimal dua perspektif teoretis
- Membedakan asumsi dasar perspektif fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik terhadap fenomena pemerintahan
- Menyusun matriks perbandingan tiga perspektif teoretis berdasarkan dimensi asumsi ontologis, unit analisis, dan implikasi terhadap pemerintahan

Tabel 2.1 Kedudukan Sub-CPMK1 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK1 — menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi pemerintahan — mencakup struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, dan institusi pemerintahan — beserta kerangka teoretis utama (fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik) sebagai landasan analisis gejala pemerintahan di masyarakat.
CPL yang didukung	CPL-02 (15%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	15% dari nilai akhir — Kuis Teori 8% dan UTS 7%
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 2.2 Pemantik

PEMANTIK

Seorang camat baru dilantik secara sah menurut hukum, dengan seluruh berkas administratif lengkap. Namun, enam bulan setelah pelantikan, banyak warga di kecamatannya masih menyebutnya "camat titipan" dan enggan menghadiri musyawarah yang ia pimpin, karena ia dianggap tidak paham kondisi lokal dan jarang turun ke desa.

1. Apakah camat tersebut sudah sah secara hukum? Apakah ia juga sudah dianggap sah oleh warganya?
2. Konsep apa dalam sosiologi pemerintahan yang paling tepat menjelaskan kesenjangan antara keabsahan hukum dan penerimaan warga ini?

■ 2.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menghubungkan empat konsep dasar sosiologi pemerintahan (struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, institusi pemerintahan) dengan tiga perspektif teoretis utama (fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik) yang akan digunakan sepanjang semester.



Gambar 2.1 Peta Konsep Unit 1

■ 2.4 Uraian Materi

2.4.1 Sosiologi Pemerintahan di Antara Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Filsafat Ilmu

Sosiologi mengkaji masyarakat sebagai sistem relasi sosial; ilmu politik mengkaji kekuasaan dan proses pengambilan keputusan kolektif; filsafat ilmu menyediakan kerangka berpikir dan metodologi untuk menilai klaim kebenaran ilmiah. Sosiologi pemerintahan lahir dari perpaduan ketiganya: ia menempatkan lembaga pemerintahan bukan sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai produk relasi sosial yang terus-menerus dinegosiasikan, dipertahankan, atau digugat oleh masyarakat.

Tabel 2.2 Perbedaan Objek Kajian Tiga Disiplin

Disiplin	Objek kajian utama	Kontribusi terhadap sosiologi pemerintahan
Sosiologi	Struktur sosial, interaksi, dan institusi masyarakat	Menjelaskan pemerintahan sebagai institusi sosial, bukan sekadar struktur hukum
Ilmu politik	Kekuasaan, negara, dan proses pengambilan keputusan publik	Menyediakan konsep kekuasaan, legitimasi, dan representasi
Filsafat ilmu	Dasar epistemologis dan metodologis ilmu pengetahuan	Menjelaskan asumsi ontologis di balik setiap perspektif teoretis

2.4.2 Empat Konsep Dasar: Struktur Sosial, Relasi Kuasa, Legitimasi, dan Institusi Pemerintahan

Struktur sosial adalah pola hubungan sosial yang relatif stabil dan terlembagakan, yang membentuk posisi dan peran setiap aktor dalam masyarakat, termasuk aktor pemerintahan. Relasi kuasa adalah kemampuan satu pihak memengaruhi tindakan pihak lain, yang menurut Max Weber dapat bersumber dari paksaan, otoritas yang diakui, atau pengaruh yang bersifat sukarela.

Legitimasi adalah pengakuan bahwa seseorang atau lembaga memiliki hak untuk memerintah — bukan sekadar kekuasaan *de facto*. Weber membedakan tiga sumber legitimasi: **tradisional** (berdasarkan kebiasaan dan adat yang diwariskan), **karismatik** (berdasarkan kualitas pribadi pemimpin yang luar biasa), dan **legal-rasional** (berdasarkan aturan dan prosedur formal yang disepakati). Institusi pemerintahan adalah aturan main yang melembaga, baik formal (hukum, struktur organisasi) maupun informal (kebiasaan, norma tidak tertulis), yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.3 Tiga Sumber Legitimasi Menurut Max Weber

Sumber legitimasi	Dasar pengakuan	Contoh dalam pemerintahan lokal
Tradisional	Kebiasaan dan adat yang diwariskan turun-temurun	Kepala adat atau raja lokal yang dihormati karena garis keturunan
Karismatik	Kualitas pribadi pemimpin yang dianggap luar biasa	Tokoh masyarakat yang disegani karena keteladanan atau perjuangannya
Legal-rasional	Aturan dan prosedur formal yang disepakati bersama	Kepala daerah terpilih melalui pemilihan umum sesuai undang-undang

Kasus camat pada kotak pemantik menunjukkan bahwa legitimasi legal-rasional (pelantikan sah secara hukum) tidak otomatis menghasilkan legitimasi sosial di mata warga; keduanya adalah dimensi yang berbeda meski sering tumpang tindih.

2.4.3 Tiga Perspektif Teoretis: Fungsionalisme, Konflik, dan Interaksionisme Simbolik

Tabel 2.4 Perbandingan Tiga Perspektif Teoretis Sosiologi Pemerintahan

Dimensi	Fungsionalisme	Konflik	Interaksionisme simbolik
Asumsi ontologis	Masyarakat sebagai sistem yang cenderung seimbang dan saling menopang	Masyarakat sebagai arena perebutan sumber daya dan kekuasaan yang timpang	Masyarakat sebagai hasil interaksi dan pemaknaan bersama antarindividu
Unit analisis	Fungsi lembaga bagi keseimbangan sistem	Kelas, kelompok kepentingan, dan dominasi	Makna, simbol, dan definisi situasi oleh aktor
Pandangan tentang pemerintahan	Pemerintahan menjalankan fungsi integratif dan adaptif bagi masyarakat	Pemerintahan sebagai alat kelompok dominan untuk mempertahankan kepentingannya	Pemerintahan sah atau tidak tergantung bagaimana warga memaknai tindakannya
Tokoh rujukan	Talcott Parsons, Robert Merton	Karl Marx, Ralf Dahrendorf	George Herbert Mead, Herbert Blumer
Keterbatasan utama	Cenderung mengabaikan konflik dan perubahan sosial	Cenderung mengabaikan konsensus dan kerja sama	Kurang menjelaskan struktur kekuasaan berskala besar

Ketiga perspektif ini bukan saling meniadakan, melainkan saling melengkapi: satu gejala pemerintahan yang sama — misalnya krisis kepercayaan terhadap seorang camat — dapat dibaca sebagai disfungsi sistem (fungsionalisme), pertarungan kepentingan elite lokal (konflik), atau persoalan pemaknaan dan komunikasi (interaksionisme simbolik).

■ 2.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: DUA KEPALA DESA DI KELURAHAN BAHARI MULYA

Kelurahan Bahari Mulya dipimpin lurah definitif yang diangkat sesuai prosedur, tetapi lebih banyak berkantor di kota kabupaten. Dalam kekosongan itu, seorang tokoh nelayan senior secara informal menjadi rujukan warga untuk menyelesaikan sengketa lahan tambak dan mengoordinasikan gotong royong, meski ia tidak memegang jabatan resmi apa pun.

Ketika lurah definitif mengeluarkan kebijakan relokasi tempat pelelangan ikan tanpa berkonsultasi, warga menolak dan lebih memilih mengikuti arahan tokoh nelayan tersebut untuk menunda relokasi hingga ada musyawarah bersama.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Identifikasi sumber legitimasi lurah definitif dan sumber legitimasi tokoh nelayan tersebut menurut tipologi Weber.
2. Jelaskan kasus ini menggunakan perspektif fungsionalisme: fungsi apa yang tidak dijalankan lurah sehingga diambil alih tokoh informal?

3. Jelaskan kasus ini menggunakan perspektif konflik: kepentingan siapa yang bertarung dalam kasus relokasi tempat pelelangan ikan?

■ 2.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 1 — POSISI SOSIOLOGI PEMERINTAHAN DAN PEMETAAN KONSEP DASAR

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak video pengantar (15–20 menit) yang memetakan posisi sosiologi pemerintahan di antara ilmu sosial lain, membaca bahan bacaan, dan mengisi lembar pra-diskusi digital berisi tiga pertanyaan reflektif tentang relevansi perspektif teoretis terhadap konteks pemerintahan di KTI.
Luring (tatap muka)	Dosen membuka sesi dengan membahas jawaban pra-diskusi, kemudian memfasilitasi pemetaan konsep kolaboratif di papan tulis. Mahasiswa dalam kelompok kecil (3–4 orang) mendiskusikan satu perspektif teoretis yang ditugaskan, lalu mempresentasikan ringkasan asumsi dan contoh kasusnya. Kuis identifikasi konsep: mengklasifikasikan 10 pernyataan ke dalam perspektif yang tepat.
Penugasan dan luaran	Matriks perbandingan tiga perspektif teoretis (asumsi dasar, unit analisis, contoh gejala pemerintahan), format tabel maksimal 2 halaman A4, diunggah ke LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Tahap 1: pembentukan kelompok Final Project (3–4 orang) ; kelompok mulai berdiskusi tentang calon lokus kabupaten/kota atau desa/kelurahan KTI.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 2 — PENYEMPURNAAN MATRIKS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Membaca ringkasan kasus krisis legitimasi/disfungsi institusi dari daerah lain; merespons forum LMS dengan analisis awal menggunakan matriks minggu 1.
Luring (tatap muka)	Dosen memfasilitasi diskusi panel: setiap kelompok mempertahankan perspektif yang diembannya dalam menganalisis kasus yang sama, diikuti sesi pleno menyepakati matriks perbandingan final kelas.
Penugasan dan luaran	Matriks perbandingan final individu, ditambah kolom implikasi terhadap sistem pemerintahan daerah, maksimal 3 halaman A4, diunggah ke LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Tahap 1 (lanjutan): kelompok menetapkan lokus dan fokus studi Final Project , menyusun proposal singkat 1–2 halaman , dan mulai mengumpulkan referensi awal dari daftar pustaka RPS.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 2.7 Rangkuman

- Sosiologi pemerintahan menjembatani sosiologi, ilmu politik, dan filsafat ilmu untuk memahami pemerintahan sebagai institusi sosial.
- Empat konsep dasar: struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi (tradisional, karismatik, legal-rasional menurut Weber), dan institusi pemerintahan.
- Legitimasi hukum dan legitimasi sosial adalah dua dimensi berbeda yang tidak selalu berjalan beriringan.
- Tiga perspektif teoretis — fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik — saling melengkapi, bukan saling meniadakan, dalam membaca gejala pemerintahan.

■ 2.8 Latihan

LATIHAN UNIT 1

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Menurut Max Weber, legitimasi yang bersumber dari aturan dan prosedur formal yang disepakati disebut
 - a. tradisional
 - b. karismatik
 - c. legal-rasional
 - d. substansial
 - e. informal
2. Perspektif yang memandang masyarakat sebagai arena perebutan sumber daya dan kekuasaan yang timpang adalah
 - a. fungsionalisme
 - b. konflik
 - c. interaksionisme simbolik
 - d. strukturalisme
 - e. behaviorisme
3. Institusi pemerintahan yang bersifat informal, seperti kebiasaan dan norma tidak tertulis, tetap disebut institusi karena
 - a. diatur dalam undang-undang
 - b. melembaga dan memengaruhi perilaku secara konsisten
 - c. ditulis dalam SOP
 - d. hanya berlaku sementara
 - e. tidak memengaruhi perilaku
4. Tokoh yang menjadi rujukan sosiologi teori konflik dalam analisis pemerintahan adalah
 - a. Talcott Parsons
 - b. Karl Marx

- c. George H. Mead
 - d. Herbert Blumer
 - e. Robert Merton
5. Kelemahan utama perspektif fungsionalisme dalam menganalisis pemerintahan adalah
- a. terlalu menekankan konflik
 - b. cenderung mengabaikan konflik dan perubahan sosial
 - c. tidak dapat menjelaskan makna simbolik
 - d. terlalu berfokus pada individu
 - e. tidak berbasis empiris

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan perbedaan antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial, lalu berikan satu contoh dari lingkungan Anda di mana keduanya tidak sejalan.
7. Pilih satu gejala pemerintahan konkret (dari berita atau pengalaman Anda), lalu jelaskan gejala tersebut menggunakan DUA dari tiga perspektif teoretis (fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik).

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 2.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 2.5 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	c	Legitimasi legal-rasional bersumber dari aturan dan prosedur formal.
2	b	Perspektif konflik menekankan pertarungan kepentingan dan dominasi.
3	b	Institusi mencakup aturan main yang melembaga, baik formal maupun informal.
4	b	Karl Marx merupakan rujukan utama perspektif konflik.
5	b	Fungsionalisme cenderung mengasumsikan keseimbangan dan mengabaikan konflik.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: legitimasi hukum: keabsahan berdasarkan prosedur formal; legitimasi sosial: penerimaan warga; contoh konkret dari pengalaman mahasiswa yang menunjukkan kesenjangan keduanya.

Tabel 2.6 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan definisi dua jenis legitimasi	12
Kesesuaian dan kedalaman contoh	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: deskripsi gejala pemerintahan yang jelas; penerapan dua perspektif secara konsisten dengan asumsi masing-masing; perbandingan hasil analisis dari kedua perspektif.

Tabel 2.7 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Kejelasan gejala yang dipilih	5
Ketepatan penerapan dua perspektif	20
Jumlah	25

■ 2.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 2.4.2 tentang tiga sumber legitimasi Weber dan buat contoh baru dari pengalaman Anda sendiri untuk masing-masing sumber.
- Diskusikan studi kasus Kelurahan Bahari Mulya di forum LMS bersama rekan yang sudah tuntas.
- Kerjakan ulang matriks perbandingan tiga perspektif dengan menambahkan kolom "kelemahan utama" untuk memperjelas perbedaannya.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca Turner (2003) *The Structure of Sociological Theory* bab tentang teori fungsionalisme struktural dan teori konflik untuk memperdalam pemahaman asumsi dasarnya.
- Cari satu berita tentang krisis kepercayaan terhadap pejabat pemerintahan daerah, lalu analisis menggunakan ketiga perspektif sekaligus.

■ 2.11 Refleksi dan Nilai ICNHS-N

REFLEKSI

1. Perspektif mana yang paling sesuai dengan cara Anda sendiri memandang pemerintahan selama ini? Mengapa?
2. Adakah tokoh informal di lingkungan Anda yang memiliki legitimasi sosial lebih kuat daripada pejabat formal? Ceritakan secara singkat.
3. Bagian mana dari unit ini yang paling sulit Anda pahami, dan langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasinya?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Menyusun matriks perbandingan berdasarkan pemahaman jujur, bukan sekadar menyalin definisi dari sumber lain.

Creativity — Menemukan contoh gejala pemerintahan orisinal dari pengalaman sendiri untuk menerapkan tiga perspektif teoretis.

Harmony — Menghargai perspektif teoretis yang berbeda dari kelompok lain saat diskusi panel di kelas.

■ 2.12 Referensi Unit

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

Turner, J. H. (2003). *The Structure of Sociological Theory* (7th ed.). Wadsworth.

Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan* (2nd ed.). Bumi Aksara.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.

BAB III · UNIT 2 · MINGGU 3–4

02

LEGITIMASI DAN INSTITUSI
PEMERINTAHAN*Menerapkan perspektif teoretis pada krisis legitimasi dan disfungsi institusi*

Sub-CPMK2

CPL-02

Bobot 13%

■ 3.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK2

Mengaplikasikan kerangka teoretis sosiologi pemerintahan untuk menganalisis gejala pemerintahan konkret di Indonesia — khususnya isu legitimasi dan institusi — melalui telaah kasus tertulis minimal 1.500 kata.

Indikator: mahasiswa mampu

- Mengaplikasikan minimal dua perspektif teoretis sosiologi pemerintahan untuk menganalisis satu kasus konkret krisis legitimasi atau disfungsi institusi pemerintahan di Indonesia
- Mengidentifikasi faktor legitimasi prosedural dan legitimasi substansial yang hadir atau tidak hadir dalam kasus tersebut
- Menyusun telaah kasus tertulis dengan struktur argumen yang runtut: deskripsi kasus, kerangka analisis, temuan, dan refleksi kritis
- Memberi dan menerima umpan balik antarsejawat secara konstruktif sebagai bagian dari integritas akademik

Tabel 3.1 Kedudukan Sub-CPMK2 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK1 — menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi pemerintahan — mencakup struktur sosial, relasi kuasa, legitimasi, dan institusi pemerintahan — beserta kerangka teoretis utama (fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik) sebagai landasan analisis gejala pemerintahan di masyarakat.
CPL yang didukung	CPL-02 (13%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	13% dari nilai akhir — Final Project 7% dan UTS 6%
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 3.2 Pemantik

PEMANTIK

Sebuah dinas pelayanan terpadu satu pintu di sebuah kabupaten memiliki gedung baru, prosedur tertulis lengkap, dan telah bersertifikat ISO. Namun, warga tetap lebih memilih mengurus izin lewat "orang dalam" karena dianggap lebih cepat dan pasti, meski harus membayar lebih.

1. Apakah dinas tersebut memiliki legitimasi prosedural? Apakah ia memiliki legitimasi substansial di mata warga?
2. Perspektif teoretis mana yang menurut Anda paling tepat untuk membongkar mengapa "jalur tidak resmi" tetap bertahan meski prosedur resmi sudah lengkap?

■ 3.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menguraikan dua jenis legitimasi (prosedural dan substansial), bentuk krisis institusional, serta bagaimana ketiga perspektif teoretis diterapkan untuk membedah krisis tersebut.



Gambar 3.1 Peta Konsep Unit 2

■ 3.4 Uraian Materi

3.4.1 Legitimasi Prosedural dan Legitimasi Substansial

Legitimasi prosedural adalah keabsahan yang diperoleh karena mengikuti aturan atau prosedur formal — misalnya pemilihan umum yang sah, pengangkatan pejabat sesuai hukum, atau sertifikasi standar pelayanan. Legitimasi substansial adalah keabsahan yang diperoleh karena kinerja dan hasil dianggap adil serta bermanfaat oleh warga, terlepas dari apakah prosedurnya sempurna.

Kedua jenis legitimasi ini idealnya berjalan beriringan, tetapi dalam praktik sering timpang. Lembaga dapat memiliki legitimasi prosedural tinggi (prosedur lengkap, sertifikasi resmi) namun legitimasi substansial rendah (warga tidak memercayai atau tidak merasakan manfaatnya), seperti pada kotak pemantik.

Tabel 3.2 Perbandingan Legitimasi Prosedural dan Substansial

Dimensi	Legitimasi prosedural	Legitimasi substansial
Dasar penilaian	Kesesuaian dengan aturan dan prosedur formal	Persepsi warga terhadap keadilan dan manfaat hasil
Contoh indikator	Sertifikasi, SOP tertulis, keabsahan hukum pengangkatan	Kepuasan warga, kepercayaan publik, penggunaan layanan resmi
Risiko bila timpang	Kepatuhan formal tanpa kepercayaan (kasus pemantik)	Popularitas tanpa keabsahan hukum yang jelas

3.4.2 Institusi Pemerintahan: Definisi, Fungsi, dan Krisis Institusional

Krisis institusional terjadi ketika sebuah lembaga pemerintahan gagal menjalankan fungsi yang diharapkan masyarakat, sehingga warga mencari jalur alternatif (formal maupun informal) untuk memenuhi kebutuhannya — seperti "orang dalam" pada kotak pemantik. Krisis ini dapat bersifat fungsional (lembaga tidak efektif), distributif (manfaat lembaga dinikmati kelompok tertentu saja), atau simbolik (warga kehilangan kepercayaan meski secara teknis lembaga masih berjalan).

- Krisis fungsional: prosedur ada tetapi tidak dijalankan konsisten oleh aparat.
- Krisis distributif: layanan formal justru lebih sulit diakses kelompok miskin atau terpencil dibanding kelompok berjangkauan.
- Krisis simbolik: media dan rumor memperkuat citra negatif lembaga meski ada perbaikan teknis.

3.4.3 Menerapkan Perspektif Teoretis pada Kasus Legitimasi dan Institusi

Perspektif fungsionalisme akan menelaah fungsi apa dari dinas pelayanan yang gagal dijalankan sehingga jalur informal muncul menggantikannya. Perspektif konflik akan menelaah siapa yang diuntungkan dari bertahannya jalur "orang dalam" — mungkin aparat tertentu atau calo yang mendapat keuntungan ekonomi. Perspektif interaksionisme simbolik akan menelaah bagaimana warga memaknai dan menceritakan pengalaman mereka dengan birokrasi, yang membentuk reputasi kolektif lembaga tersebut dari mulut ke mulut.

Metodologi telaah kasus yang baik memadukan deskripsi kasus yang jelas, penerapan kerangka teoretis secara eksplisit, temuan yang didukung data atau observasi, dan refleksi kritis tentang keterbatasan analisis.

■ 3.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAP KANTOR CAMAT TANJUNG REJEKI

Kantor Kecamatan Tanjung Rejeki telah menerapkan sistem antrean digital dan papan alur pelayanan sesuai standar nasional. Namun, dalam survei kepuasan internal, 60% responden menyatakan pernah "titip" berkas melalui kenalan pegawai agar prosesnya lebih cepat, dan hanya 30% yang menyatakan puas terhadap kejelasan waktu penyelesaian.

Camat kemudian mengevaluasi bahwa meski prosedur formal sudah lengkap di atas kertas, penerapannya di lapangan tidak konsisten: sebagian pegawai memprioritaskan kenalan, sementara warga awam menunggu lebih lama tanpa kejelasan.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Identifikasi jenis krisis institusional (fungsional, distributif, atau simbolik) yang paling menonjol pada kasus ini, dan jelaskan alasannya.
2. Terapkan perspektif konflik untuk menjelaskan siapa yang diuntungkan dari ketidakkonsistenan penerapan prosedur ini.
3. Jika Anda menjadi camat, langkah apa yang akan Anda ambil untuk memperkuat legitimasi substansial tanpa mengubah prosedur formal yang sudah ada?

■ 3.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 3 — LEGITIMASI DAN KRISIS INSTITUSIONAL

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak paparan singkat tentang legitimasi prosedural-substansial dan jenis krisis institusional; membaca satu contoh kasus krisis institusi dari media massa yang diunggah dosen.
Luring (tatap muka)	Diskusi kelas membedah kasus krisis institusi yang dibaca; dosen memodelkan cara menyusun telaah kasus (deskripsi–kerangka analisis–temuan–refleksi) di papan tulis.
Penugasan dan luaran	Draf awal telaah kasus tertulis minimal 1.500 kata, memuat: (1) deskripsi kasus, (2) kerangka analisis dari dua perspektif, (3) temuan tentang faktor legitimasi/institusi, (4) refleksi kritis; diunggah ke LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project mulai menyusun draf kerangka konseptual yang mengaplikasikan teori pada isu legitimasi dan institusi pemerintahan di lokus yang dipilih.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 4 — REVISI TELAAH KASUS DAN EVALUASI SEJAWAT

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menukar draf telaah kasus dengan satu rekan melalui LMS untuk direview menggunakan lembar evaluasi sejawat terstruktur.
Luring (tatap muka)	Sesi klinik penulisan: dosen memberi umpan balik atas beberapa contoh draf; mahasiswa merevisi telaah kasus berdasarkan masukan sejawat dan dosen.
Penugasan dan luaran	Telaah kasus final yang telah direvisi minimal 1.500 kata, dilengkapi lembar evaluasi sejawat yang telah diisi dan ditandatangani, diunggah ke LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project melanjutkan perancangan panduan wawancara/observasi lapangan dan mengidentifikasi dokumen kebijakan sekunder untuk komparasi dua daerah.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 3.7 Rangkuman

- Legitimasi prosedural (kesesuaian aturan) dan legitimasi substansial (penerimaan warga) adalah dua dimensi berbeda yang sering timpang.
- Krisis institusional dapat bersifat fungsional, distributif, atau simbolik, dan ketiganya sering muncul bersamaan.
- Menelaah kasus krisis legitimasi memerlukan penerapan eksplisit minimal dua perspektif teoretis, bukan sekadar deskripsi.
- Telaah kasus yang baik memuat deskripsi, kerangka analisis, temuan, dan refleksi kritis secara runtut.

■ 3.8 Latihan**LATIHAN UNIT 2**

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Legitimasi yang diperoleh karena kinerja lembaga dianggap adil dan bermanfaat oleh warga disebut legitimasi
 - a. prosedural
 - b. substansial
 - c. karismatik
 - d. formal
 - e. legal
2. Krisis institusional di mana manfaat lembaga hanya dinikmati kelompok tertentu disebut krisis
 - a. fungsional
 - b. distributif

- c. simbolik
 - d. prosedural
 - e. legal
3. Pada kasus Kantor Camat Tanjung Rejeki, unsur yang menunjukkan legitimasi prosedural sudah terpenuhi adalah
- a. warga tidak puas
 - b. sistem antrean digital dan SOP sudah diterapkan
 - c. banyak warga titip berkas
 - d. camat dievaluasi buruk
 - e. survei kepuasan rendah
4. Struktur telaah kasus yang direkomendasikan pada unit ini adalah
- a. hanya deskripsi kasus
 - b. deskripsi, kerangka analisis, temuan, refleksi
 - c. hanya kesimpulan
 - d. kutipan pustaka saja
 - e. daftar pertanyaan tanpa jawaban
5. Evaluasi sejawat dalam penyusunan telaah kasus bertujuan utama untuk
- a. menambah nilai teman
 - b. melatih integritas akademik dan pembelajaran kritis melalui umpan balik konstruktif
 - c. menggantikan penilaian dosen
 - d. mempercepat pengumpulan tugas
 - e. menghindari revisi

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan perbedaan krisis institusional fungsional, distributif, dan simbolik, lalu identifikasi jenis mana yang paling dominan pada kasus Kantor Camat Tanjung Rejeki.
7. Pilih satu lembaga pemerintahan yang Anda kenal, lalu nilai legitimasi prosedural dan substansialnya secara terpisah dengan argumen yang berbeda untuk masing-masing.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 3.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 3.3 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Legitimasi substansial dinilai dari persepsi keadilan dan manfaat.
2	b	Krisis distributif terkait ketimpangan akses terhadap manfaat lembaga.

No	Kunci	Pembahasan
3	b	Sistem dan SOP yang formal menunjukkan legitimasi prosedural.
4	b	Struktur tersebut memastikan analisis yang runtut dan mendalam.
5	b	Evaluasi sejawat melatih kemampuan memberi dan menerima kritik secara konstruktif.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: definisi tiga jenis krisis; identifikasi krisis fungsional dan distributif sebagai yang paling menonjol pada kasus (prosedur tidak konsisten dijalankan, warga berjejaringan diuntungkan).

Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan tiga definisi	12
Ketepatan identifikasi pada kasus	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: penilaian legitimasi prosedural berdasarkan kepatuhan pada aturan; penilaian legitimasi substansial berdasarkan persepsi manfaat/keadilan; kedua penilaian harus argumentatif, bukan sekadar opini.

Tabel 3.5 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Penilaian legitimasi prosedural	12
Penilaian legitimasi substansial	13
Jumlah	25

■ 3.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 3.4.1 tentang legitimasi prosedural dan substansial, lalu identifikasi keduanya pada satu lembaga di daerah Anda.
- Diskusikan kembali kasus Kantor Camat Tanjung Rejeki dengan menerapkan perspektif interaksionisme simbolik (yang belum diminta pada pertanyaan analisis) di forum LMS.
- Minta rekan yang sudah tuntas untuk menunjukkan bagian mana dari telaah kasus Anda yang masih deskriptif dan belum benar-benar analitis.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca Habermas (1996) *Between Facts and Norms* bagian tentang legitimasi hukum dan demokrasi deliberatif untuk memperdalam konsep legitimasi substansial.
- Cari kasus krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan lain (kepolisian, pengadilan, atau lembaga pelayanan publik) dan bandingkan pola krisisnya dengan kasus dalam unit ini.

■ 3.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N**REFLEKSI**

1. Pernahkah Anda atau keluarga Anda memilih jalur "tidak resmi" saat mengurus layanan pemerintahan? Mengapa?
2. Apakah menurut Anda legitimasi substansial lebih penting daripada legitimasi prosedural, atau sebaliknya? Berikan alasan.
3. Bagaimana proses menerima evaluasi sejawat memengaruhi cara Anda menulis telaah kasus ini?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Menerima dan memberi evaluasi sejawat secara jujur, termasuk mengakui kelemahan telaah kasus sendiri.

Service — Merumuskan rekomendasi perbaikan layanan yang berpihak pada kepentingan warga, bukan aparat.

Adaptability — Merevisi telaah kasus berdasarkan umpan balik sejawat dan dosen tanpa bersikap defensif.

■ 3.12 Referensi Unit

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

Sinamo, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jala Permata Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB IV · UNIT 3 · MINGGU 5–6

03 HUBUNGAN PUSAT–DAERAH DAN KELEMBAGAAN LOKAL

Desentralisasi, otonomi daerah, dan variasi kelembagaan lokal di Kawasan Timur Indonesia

Sub-CPMK3

CPL-03 · CPL-06

Bobot 20%

■ 4.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK3

Menganalisis dinamika hubungan pusat–daerah dan kelembagaan lokal di Kawasan Timur Indonesia dengan membandingkan minimal dua daerah/kasus berdasarkan data empiris sekunder (dokumen kebijakan, laporan resmi, atau hasil riset terpublikasi).

Indikator: mahasiswa mampu

- Mengidentifikasi kerangka normatif hubungan pusat–daerah berdasarkan regulasi desentralisasi yang berlaku
- Membandingkan pola hubungan pusat–daerah pada minimal dua daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan dokumen kebijakan
- Menganalisis fungsi dan relasi kelembagaan lokal (BPD, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan desa) dalam tata pemerintahan desa
- Menyusun laporan analisis kelembagaan lokal satu desa/kasus di KTI dilengkapi bagan struktur kelembagaan

Tabel 4.1 Kedudukan Sub-CPMK3 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK2 — menganalisis pola relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia, termasuk dinamika hubungan pusat–daerah, kelembagaan lokal, dan praktik demokrasi akar rumput, melalui studi kasus berbasis data empiris.
CPL yang didukung	CPL-03 (10%); CPL-06 (10%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	20% dari nilai akhir — Final Project 7%, Kuis Teori 7%, dan UTS 6%
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 4.2 Pemantik

PEMANTIK

Kabupaten A menerima dana transfer daerah yang sama besar dengan Kabupaten B, tetapi Kabupaten A berhasil membangun banyak fasilitas desa dengan kelembagaan lokal yang aktif, sementara Kabupaten B kesulitan menyerap anggaran karena BPD dan lembaga desa hampir tidak berfungsi.

1. Mengapa dua daerah dengan sumber daya fiskal serupa bisa menghasilkan capaian tata kelola yang sangat berbeda?
2. Faktor kelembagaan lokal apa yang menurut Anda paling menentukan perbedaan ini?

■ 4.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menghubungkan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan dimensi kewenangan, serta kelembagaan lokal di tingkat desa yang menjadi penentu efektivitas hubungan pusat–daerah.



Gambar 4.1 Peta Konsep Unit 3

■ 4.4 Uraian Materi

4.4.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mencakup dimensi politik (pemilihan kepala daerah), administratif (penyelenggaraan urusan pemerintahan), dan fiskal (transfer dana dan kewenangan pajak/retribusi daerah). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.2 Tiga Dimensi Desentralisasi

Dimensi	Cakupan	Contoh implikasi di daerah
Politik	Pemilihan kepala daerah dan DPRD secara langsung	Akuntabilitas kepala daerah kepada pemilih lokal, bukan hanya kepada pusat
Administratif	Pembagian urusan pemerintahan wajib dan pilihan	Daerah menyelenggarakan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan pelayanan publik
Fiskal	Transfer dana (DAU, DAK, Dana Desa) dan pajak/retribusi daerah	Kapasitas fiskal menentukan ruang gerak program daerah

Desentralisasi tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik; kapasitas kelembagaan lokal — termasuk BPD, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan desa — menjadi variabel penentu apakah kewenangan yang dilimpahkan benar-benar digunakan untuk kepentingan warga, sebagaimana ditunjukkan pada kotak pemantik.

4.4.2 Kelembagaan Lokal: BPD, Lembaga Adat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk peraturan desa bersama kepala desa, serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Lembaga adat berperan menjaga norma dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat setempat, sementara lembaga kemasyarakatan desa (seperti PKK, karang taruna, kelompok tani) menjadi wadah partisipasi warga dalam pembangunan.

- Fungsi representasi: menyalurkan aspirasi warga ke pemerintah desa.
- Fungsi legislasi: bersama kepala desa menyusun peraturan desa.
- Fungsi pengawasan: mengawasi pelaksanaan APBDes dan kinerja kepala desa.
- Fungsi penyelesaian sengketa: khusus lembaga adat, menyelesaikan konflik berdasarkan norma lokal.

Variasi praktik kelembagaan lokal antar-desa di KTI sangat besar: sebagian desa memiliki BPD dan lembaga adat yang aktif dan saling melengkapi, sementara desa lain memiliki kelembagaan yang hanya ada di atas kertas tanpa aktivitas nyata, akibat rendahnya kapasitas SDM, minimnya insentif, atau dominasi kepala desa yang tidak terbuka terhadap pengawasan.

4.4.3 Metode Membandingkan Dua Daerah/Kasus Berdasarkan Data Sekunder

Analisis komparatif dua daerah memerlukan data sekunder yang sepadan: dokumen kebijakan (RPJMD, Perda), laporan resmi (LKPJ, laporan BPS), atau hasil riset terpublikasi. Perbandingan yang baik menetapkan dimensi pembanding yang jelas — misalnya kapasitas fiskal, keaktifan BPD, atau pola pengambilan keputusan — bukan sekadar menceritakan dua daerah secara terpisah.

■ 4.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: DUA POLA HUBUNGAN PUSAT–DAERAH: KABUPATEN WAEPANA DAN KABUPATEN SOMBA PRAJA

Kabupaten Waepana menerima Dana Desa dalam jumlah yang hampir sama dengan Kabupaten Somba Praja. Di Waepana, BPD di sebagian besar desa rutin mengadakan rapat evaluasi

triwulanan bersama lembaga adat, sehingga usulan program benar-benar berasal dari musyawarah warga dan diawasi ketat.

Di Somba Praja, BPD di banyak desa hanya aktif menjelang pencairan anggaran, sementara lembaga adat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Akibatnya, sejumlah proyek desa di Somba Praja mangkrak karena tidak sesuai kebutuhan warga dan minim pengawasan.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Bandingkan pola hubungan pusat–daerah di kedua kabupaten pada dimensi fiskal dan administratif.
2. Identifikasi faktor kelembagaan lokal yang membedakan efektivitas penggunaan Dana Desa di kedua kabupaten.
3. Berdasarkan data ilustratif ini, rumuskan satu rekomendasi penguatan kelembagaan lokal untuk Kabupaten Somba Praja.

■ 4.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 5 — HUBUNGAN PUSAT–DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Membaca ringkasan regulasi desentralisasi (UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa) serta satu laporan BPS tentang kapasitas fiskal daerah KTI; mengisi lembar identifikasi tiga dimensi desentralisasi.
Luring (tatap muka)	Diskusi kelas tentang variasi kapasitas fiskal antardaerah KTI; dosen memodelkan cara membaca dan mengutip data sekunder (dokumen kebijakan, laporan BPS) secara benar.
Penugasan dan luaran	Matriks komparatif hubungan pusat–daerah dua kasus KTI (1–2 halaman A4, tabel plus narasi analitis minimal 300 kata), dikumpulkan di LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project melanjutkan pengumpulan dokumen kebijakan sekunder untuk komparasi dua daerah sesuai lokus yang dipilih.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 6 — KELEMBAGAAN LOKAL DAN DEMOKRASI AKAR RUMPUT

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak paparan tentang fungsi BPD, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan desa; membaca satu profil kelembagaan desa dari laporan Kurniawan (2015).
Luring (tatap muka)	Kerja kelompok kecil menyusun bagan struktur kelembagaan desa berdasarkan profil yang dibaca, dilanjutkan diskusi pleno membandingkan variasi antar-kelompok.
Penugasan dan luaran	Laporan analisis kelembagaan lokal satu desa/kasus di KTI (minimal 400 kata, dilengkapi bagan struktur kelembagaan), dikumpulkan di LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project menyiapkan instrumen lapangan (panduan wawancara/observasi) untuk pengumpulan data pada minggu 7–9.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 4.7 Rangkuman

- Desentralisasi mencakup tiga dimensi: politik, administratif, dan fiskal.
- Otonomi daerah tidak otomatis menghasilkan tata kelola baik tanpa kelembagaan lokal yang berfungsi.
- BPD, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa yang saling melengkapi.
- Variasi kelembagaan lokal antar-desa di KTI sangat menentukan efektivitas penggunaan kewenangan dan anggaran yang didesentralisasikan.

■ 4.8 Latihan**LATIHAN UNIT 3**

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Dimensi desentralisasi yang berkaitan dengan transfer dana dan kewenangan pajak/retribusi daerah disebut dimensi
 - a. politik
 - b. administratif
 - c. fiskal
 - d. yudikatif
 - e. legislatif
2. Lembaga desa yang berfungsi membentuk peraturan desa bersama kepala desa dan mengawasi kinerjanya adalah
 - a. PKK
 - b. karang taruna
 - c. BPD

- d. lembaga adat
 - e. kelompok tani
3. Ciri utama analisis komparatif dua daerah yang baik adalah
- a. menceritakan dua daerah secara terpisah tanpa dimensi pembandingan
 - b. menetapkan dimensi pembandingan yang jelas dan konsisten
 - c. hanya menggunakan satu sumber data
 - d. mengabaikan data sekunder
 - e. fokus pada satu daerah saja
4. Pada kasus Kabupaten Waepana dan Somba Praja, faktor utama yang membedakan efektivitas Dana Desa adalah
- a. jumlah dana yang berbeda jauh
 - b. keaktifan BPD dan pelibatan lembaga adat
 - c. letak geografis semata
 - d. jumlah penduduk
 - e. luas wilayah
5. Otonomi daerah didefinisikan sebagai
- a. kewenangan penuh tanpa batas dari pusat
 - b. hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur urusan sendiri dalam kerangka NKRI
 - c. pemisahan wilayah dari negara
 - d. kewenangan yudikatif daerah
 - e. hak veto daerah terhadap kebijakan pusat

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

- 6. Jelaskan tiga dimensi desentralisasi (politik, administratif, fiskal) dan berikan satu contoh implikasi masing-masing dimensi di daerah Anda.
- 7. Bandingkan fungsi BPD dan lembaga adat dalam tata pemerintahan desa, lalu jelaskan mengapa keduanya perlu bekerja sama, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 4.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 4.3 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	c	Dimensi fiskal mencakup transfer dana dan kewenangan perpajakan daerah.
2	c	BPD berfungsi legislasi dan pengawasan bersama kepala desa.
3	b	Perbandingan yang baik memerlukan dimensi pembandingan yang jelas.

No	Kunci	Pembahasan
4	b	Perbedaan utama terletak pada keaktifan kelembagaan lokal, bukan jumlah dana.
5	b	Otonomi daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: definisi tiga dimensi; contoh konkret untuk masing-masing dimensi dari pengalaman atau pengamatan mahasiswa terhadap daerahnya.

Tabel 4.4 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan tiga definisi	12
Kesesuaian tiga contoh	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: perbandingan fungsi representasi/legislasi/pengawasan (BPD) dengan fungsi penyelesaian sengketa dan penjaga norma (lembaga adat); argumen tentang komplementaritas keduanya untuk tata kelola desa yang legitimate secara hukum maupun sosial.

Tabel 4.5 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Perbandingan fungsi	13
Argumen komplementaritas	12
Jumlah	25

■ 4.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 4.4.1 tentang tiga dimensi desentralisasi dan buat contoh baru untuk masing-masing dimensi dari daerah Anda sendiri.
- Kerjakan ulang bagan struktur kelembagaan desa dengan menambahkan garis relasi antara BPD, lembaga adat, dan kepala desa.
- Diskusikan kembali kasus Waepana–Somba Praja di forum LMS, fokus pada aspek fiskal yang belum terjawab.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca Kurniawan (2015) *Desa Mandiri, Desa Membangun* untuk contoh empiris variasi kelembagaan desa di Indonesia.

- Cari data BPS tentang alokasi Dana Desa di provinsi Anda dan bandingkan dengan capaian pembangunan desa yang dilaporkan.

■ 4.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Bagaimana keaktifan BPD atau lembaga adat di desa/kelurahan asal Anda, berdasarkan pengamatan Anda sendiri?
2. Menurut Anda, apakah desentralisasi fiskal di Indonesia sudah cukup diimbangi dengan penguatan kelembagaan lokal? Mengapa?
3. Apa tantangan terbesar yang dihadapi kelompok Final Project Anda dalam menyiapkan instrumen lapangan minggu ini?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Service — Merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan lokal yang berorientasi pada kepentingan warga desa.

Adaptability — Menyesuaikan instrumen wawancara/observasi dengan konteks dan kearifan lokal daerah yang dipilih.

Nationalism — Memahami hubungan pusat–daerah sebagai wujud pemerataan kewenangan dan sumber daya ke seluruh wilayah Indonesia.

■ 4.12 Referensi Unit

Sinamo, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jala Permata Aksara.

Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB V · UNIT 4 · MINGGU 7

04

DEMOKRASI AKAR RUMPUT DI DESA
KAWASAN TIMUR INDONESIA

Observasi dan wawancara lapangan tentang relasi pemerintah desa dan masyarakat

Sub-CPMK4

CPL-03 · CPL-06

Bobot 17%

■ 5.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK4

Mengevaluasi praktik demokrasi akar rumput dan pola relasi sosial antara pemerintah desa dengan masyarakat di satu desa/kelurahan di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus berbasis observasi lapangan atau wawancara minimal 5 informan.

Indikator: mahasiswa mampu

- Merancang instrumen observasi dan panduan wawancara untuk menggali praktik demokrasi akar rumput di satu desa/kelurahan di KTI
- Melaksanakan pengumpulan data lapangan melalui observasi atau wawancara minimal 5 informan kunci secara etis
- Mendokumentasikan data lapangan dalam transkrip dan catatan observasi yang terstruktur
- Mengevaluasi praktik demokrasi akar rumput dan relasi sosial pemerintah–masyarakat berdasarkan data yang dikumpulkan

Tabel 5.1 Kedudukan Sub-CPMK4 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK2 — menganalisis pola relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia, termasuk dinamika hubungan pusat–daerah, kelembagaan lokal, dan praktik demokrasi akar rumput, melalui studi kasus berbasis data empiris.
CPL yang didukung	CPL-03 (10%); CPL-06 (7%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	17% dari nilai akhir — Final Project 8% dan UAS 9%
Estimasi waktu belajar	1 minggu × 510 menit = 510 menit (8,5 jam): PB 150 menit, PT 180 menit, KM 180 menit

■ 5.2 Pemantik

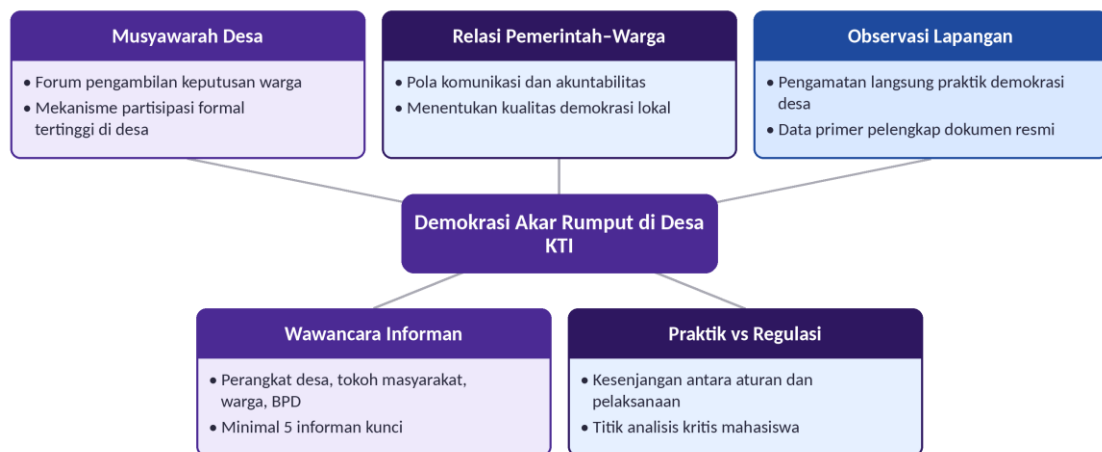
PEMANTIK

Di sebuah desa, musyawarah desa selalu dihadiri warga dalam jumlah banyak, tetapi keputusan akhir hampir selalu sama dengan usulan awal kepala desa. Warga hadir, tetapi jarang ada yang benar-benar mengubah arah keputusan.

1. Apakah desa tersebut sudah menjalankan demokrasi akar rumput? Jelaskan alasannya.
2. Data apa yang perlu Anda kumpulkan di lapangan untuk memastikan jawaban Anda, bukan sekadar menduga?

■ 5.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menghubungkan praktik demokrasi akar rumput, relasi sosial pemerintah-warga, dan dua metode pengumpulan data lapangan (observasi dan wawancara) yang digunakan pada unit ini.



Gambar 5.1 Peta Konsep Unit 4

■ 5.4 Uraian Materi

5.4.1 Demokrasi Akar Rumput dan Musyawarah Desa

Demokrasi akar rumput merujuk pada praktik pengambilan keputusan yang melibatkan warga secara langsung di tingkat paling lokal, dengan musyawarah desa sebagai mekanisme partisipasi formal tertinggi menurut Undang-Undang Desa. Namun, kehadiran warga dalam forum tidak otomatis berarti demokrasi substantif berjalan — seperti pada kotak pemantik, partisipasi bisa jadi sekadar formalitas (partisipasi semu) jika keputusan sesungguhnya sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 5.2 Indikator Demokrasi Akar Rumput yang Substantif

Indikator	Penjelasan
Keterbukaan agenda	Warga mengetahui agenda musyawarah sebelum forum berlangsung, bukan mendadak di tempat

Indikator	Penjelasan
Kesempatan bicara merata	Kelompok perempuan, pemuda, dan warga biasa mendapat ruang bicara, bukan hanya elite desa
Pengaruh nyata terhadap keputusan	Usulan warga benar-benar mengubah rancangan keputusan awal, bukan sekadar formalitas
Akuntabilitas hasil	Keputusan musyawarah dilaksanakan dan dilaporkan kembali kepada warga

5.4.2 Relasi Sosial Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pola relasi sosial antara pemerintah desa dan warga dapat bersifat dialogis (dua arah, warga dilibatkan sejak perencanaan), paternalistik (pemerintah desa memutuskan "demi kebaikan" warga tanpa dialog memadai), atau transaksional (relasi didasarkan pertukaran kepentingan jangka pendek). Pola ini memengaruhi sejauh mana kebijakan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.

- Relasi dialogis: forum rutin, keterbukaan informasi anggaran, ruang bagi kelompok rentan untuk bersuara.
- Relasi paternalistik: keputusan sudah final sebelum musyawarah, warga hanya diberi tahu.
- Relasi transaksional: dukungan warga diberikan sebagai pertukaran manfaat pribadi, bukan berdasarkan substansi kebijakan.

5.4.3 Merancang dan Melaksanakan Observasi serta Wawancara Lapangan

Observasi lapangan mencatat perilaku dan interaksi yang benar-benar terjadi (misalnya siapa yang berbicara dalam musyawarah, berapa lama, dan bagaimana responsnya), sedangkan wawancara semi-terstruktur menggali persepsi dan pengalaman informan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel. Informan kunci sebaiknya mencakup perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, warga biasa, dan anggota BPD atau DPRD, agar diperoleh sudut pandang yang beragam.

Tabel 5.3 Panduan Etika Pengumpulan Data Lapangan

Prinsip	Penerapan
Persetujuan informan	Menjelaskan tujuan penelitian dan meminta kesediaan informan sebelum wawancara/observasi dimulai
Kerahasiaan data	Nama dan identitas informan disamarkan dalam laporan sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP
Kejujuran pencatatan	Mencatat data apa adanya, termasuk temuan yang tidak sesuai dugaan awal mahasiswa
Kepekaan konteks lokal	Menyesuaikan cara bertanya dengan norma dan kebiasaan setempat, terutama di komunitas adat

■ 5.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: MUSYAWARAH DESA LIANG BUNGA

Mahasiswa yang melakukan observasi di Desa Liang Bunga mencatat bahwa musyawarah desa dihadiri sekitar 80 warga, tetapi hanya 6 orang yang berbicara — seluruhnya laki-laki dan sebagian besar merupakan kerabat kepala desa. Perempuan dan pemuda hadir namun duduk di barisan belakang dan tidak diberi kesempatan bicara.

Dalam wawancara terpisah, seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin mengusulkan perbaikan akses air bersih, tetapi merasa forum tersebut "bukan tempatnya" untuk berbicara.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Berdasarkan data observasi dan wawancara ini, apakah musyawarah Desa Liang Bunga mencerminkan relasi dialogis, paternalistik, atau transaksional? Jelaskan.
2. Identifikasi kelompok yang secara sistematis tidak terwakili dalam forum ini, dan jelaskan implikasinya terhadap demokrasi akar rumput.
3. Rancang satu rekomendasi konkret agar musyawarah desa berikutnya lebih inklusif terhadap perempuan dan pemuda.

■ 5.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 7 — PRAKTIK DEMOKRASI AKAR RUMPUT DI DESA KTI

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak paparan tentang metode observasi dan wawancara semi-terstruktur, serta etika penelitian lapangan (persetujuan informan, kerahasiaan data sesuai UU PDP); menyusun draf panduan wawancara/observasi individual.
Luring (tatap muka)	Simulasi wawancara berpasangan di kelas untuk melatih teknik bertanya dan mencatat; dosen memberi umpan balik atas panduan wawancara/observasi yang disusun mahasiswa.
Penugasan dan luaran	Laporan studi kasus lapangan (minimal 800 kata plus lampiran transkrip ringkasan wawancara dan/atau catatan observasi) dikumpulkan di LMS UNISAN paling lambat H+3 setelah sesi luring.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project mulai pelaksanaan pengumpulan data lapangan (wawancara ≥5 informan dan/atau observasi) yang akan berlanjut hingga minggu 9.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 5.7 Rangkuman

- Demokrasi akar rumput substantif memerlukan lebih dari sekadar kehadiran warga dalam forum; keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan menjadi indikator utamanya.
- Relasi pemerintah desa-masyarakat dapat bersifat dialogis, paternalistik, atau transaksional, dengan implikasi berbeda terhadap kualitas demokrasi lokal.
- Observasi mencatat perilaku nyata, sedangkan wawancara menggali persepsi dan pengalaman; keduanya saling melengkapi.
- Etika penelitian lapangan — persetujuan informan dan kerahasiaan data — wajib dijaga sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP.

■ 5.8 Latihan

LATIHAN UNIT 4

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Relasi pemerintah desa-masyarakat di mana keputusan sudah final sebelum musyawarah disebut relasi
 - a. dialogis
 - b. paternalistik
 - c. transaksional
 - d. partisipatif
 - e. deliberatif
2. Metode yang mencatat perilaku dan interaksi yang benar-benar terjadi di lapangan disebut
 - a. wawancara terstruktur
 - b. observasi
 - c. survei kuesioner
 - d. studi dokumen
 - e. focus group tertutup
3. Pada kasus Desa Liang Bunga, kelompok yang tidak terwakili secara sistematis dalam musyawarah adalah
 - a. kepala desa
 - b. kerabat kepala desa
 - c. perempuan dan pemuda
 - d. seluruh warga
 - e. tidak ada
4. Jumlah minimal informan kunci yang disyaratkan untuk studi kasus lapangan unit ini adalah
 - a. 2

- b. 3
- c. 5
- d. 10
- e. 1

5. Perlindungan kerahasiaan data narasumber dalam penelitian lapangan diatur dalam
- a. UU Desa
 - b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP
 - c. UU Pemerintahan Daerah
 - d. UU ITE
 - e. UU Pelayanan Publik

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan perbedaan relasi dialogis, paternalistik, dan transaksional antara pemerintah desa dan masyarakat, lalu berikan satu indikator konkret untuk mengenali masing-masing pola di lapangan.
7. Rancang tiga pertanyaan wawancara semi-terstruktur untuk menggali sejauh mana perempuan dilibatkan dalam musyawarah desa, disertai alasan mengapa pertanyaan tersebut relevan.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 5.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 5.4 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Relasi paternalistik ditandai keputusan sepihak tanpa dialog memadai.
2	b	Observasi mencatat perilaku nyata yang teramati langsung.
3	c	Perempuan dan pemuda hadir namun tidak diberi ruang bicara.
4	c	RPS mensyaratkan wawancara atau observasi minimal 5 informan kunci.
5	b	UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur Pelindungan Data Pribadi.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: definisi tiga pola relasi; indikator konkret dan teramati untuk masing-masing (misal: keterbukaan informasi anggaran untuk dialogis, keputusan sepihak untuk paternalistik, pertukaran kepentingan pribadi untuk transaksional).

Tabel 5.5 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan tiga definisi	12
Ketepatan tiga indikator konkret	13

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: tiga pertanyaan terbuka yang tidak menggiring jawaban, relevan dengan tujuan menggali keterlibatan perempuan, disertai justifikasi metodologis singkat untuk masing-masing pertanyaan.

Tabel 5.6 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Kualitas tiga pertanyaan	15
Justifikasi metodologis	10
Jumlah	25

■ 5.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 5.4.2 tentang tiga pola relasi pemerintah desa-masyarakat dan identifikasi polanya di desa/kelurahan Anda sendiri.
- Revisi panduan wawancara Anda dengan menghindari pertanyaan tertutup (ya/tidak) dan menggantinya dengan pertanyaan terbuka.
- Diskusikan dengan dosen atau rekan mengenai kendala etis yang mungkin muncul saat wawancara di lapangan.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca Putnam (1993) *Making Democracy Work* tentang modal sosial dan kualitas demokrasi lokal di Italia untuk perbandingan konteks.
- Bandingkan praktik musyawarah desa di dua desa berbeda yang Anda ketahui, lalu identifikasi faktor yang membuat salah satunya lebih partisipatif.

■ 5.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Bagaimana pengalaman pertama Anda melakukan wawancara atau observasi lapangan untuk unit ini?
2. Kesulitan etis apa yang Anda hadapi, dan bagaimana Anda mengatasinya?
3. Apakah temuan lapangan Anda mengonfirmasi atau justru mematahkan dugaan awal Anda tentang demokrasi akar rumput di lokasi tersebut?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Mencatat dan melaporkan data lapangan apa adanya, termasuk temuan yang tidak sesuai harapan awal.

Harmony — Menghormati kesediaan dan kenyamanan informan selama proses wawancara/observasi.

Service — Merumuskan rekomendasi yang berpihak pada kelompok yang kurang terwakili dalam forum desa.

■ 5.12 Referensi Unit

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB VI · UNIT 5 · MINGGU 9–12

05

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
MOBILISASI SOSIAL*Tipologi partisipasi, faktor mobilisasi, dan pendalaman kasus lintas daerah Kawasan Timur Indonesia*

Sub-CPMK5

CPL-02 · CPL-06

Bobot 20%

■ 6.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK5

Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan faktor pendorong mobilisasi sosial dalam konteks pemerintahan lokal dengan mengklasifikasikan tipologi partisipasi berdasarkan minimal dua kasus nyata di Indonesia.

Indikator: mahasiswa mampu

- Mengklasifikasikan minimal empat tipologi partisipasi masyarakat (konvensional, nonkonvensional, formal, informal) berdasarkan kerangka teori yang relevan
- Mengidentifikasi faktor pendorong mobilisasi sosial: kepemimpinan lokal, jaringan sosial, sumber daya, dan peluang politik
- Menganalisis efektivitas partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan pemerintahan lokal berdasarkan minimal dua kasus nyata
- Membandingkan pola partisipasi antar-konteks wilayah di Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia

Tabel 6.1 Kedudukan Sub-CPMK5 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK3 — mengevaluasi fenomena partisipasi masyarakat, mobilisasi sosial, dan dinamika kekuasaan lokal — termasuk isu kepemiluan, gerakan sosial, dan kontestasi politik di tingkat daerah — dengan menghasilkan laporan analisis kritis yang menyajikan argumen berbasis teori sosiologi pemerintahan dan bukti lapangan.
CPL yang didukung	CPL-02 (10%); CPL-06 (10%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	20% dari nilai akhir — Final Project 6%, UTS 6%, dan UAS 8%
Estimasi waktu belajar	4 minggu × 510 menit = 2.040 menit (34 jam): PB 600 menit, PT 720 menit, KM 720 menit

■ 6.2 Pemantik

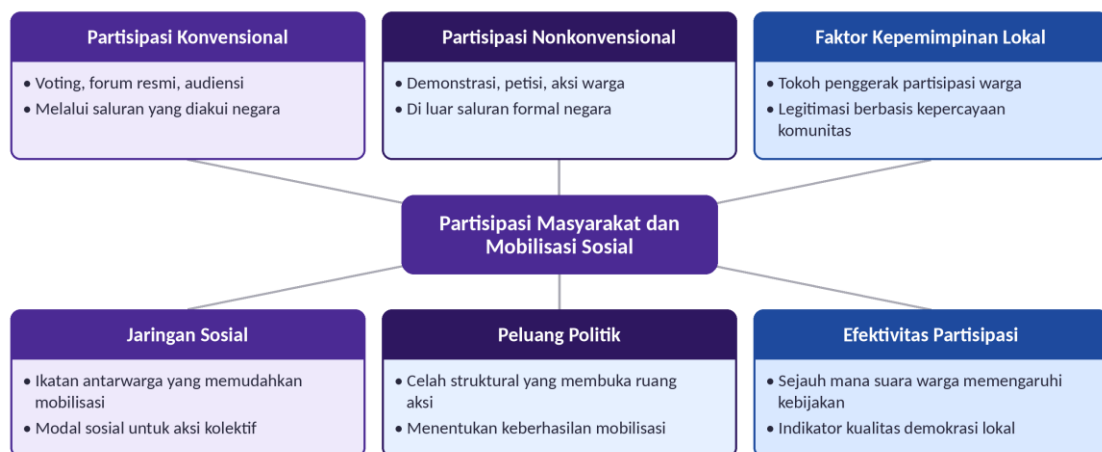
PEMANTIK

Di sebuah kabupaten, ratusan warga rutin mengikuti pemungutan suara setiap pemilu (partisipasi tinggi), tetapi ketika pemerintah daerah hendak menggusur permukiman nelayan untuk proyek wisata, hanya segelintir warga yang berani mengajukan protes terbuka, meski mayoritas diam-diam menolak.

1. Mengapa partisipasi yang tinggi dalam pemilu tidak selalu diikuti partisipasi yang tinggi dalam isu kebijakan sehari-hari?
2. Faktor apa yang menurut Anda membuat sebagian kecil warga berani bersuara sementara mayoritas memilih diam?

■ 6.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut memetakan tipologi partisipasi masyarakat dan empat faktor utama pendorong mobilisasi sosial yang akan digunakan untuk menganalisis kasus-kasus pada unit ini.



Gambar 6.1 Peta Konsep Unit 5

■ 6.4 Uraian Materi

6.4.1 Tipologi Partisipasi Masyarakat

Tabel 6.2 Empat Tipologi Partisipasi Masyarakat

Tipologi	Ciri utama	Contoh
Konvensional	Melalui saluran yang diakui dan diatur negara	Memilih dalam pemilu, menghadiri musyawarah resmi
Nonkonvensional	Di luar saluran formal negara, kadang konfrontatif	Demonstrasi, petisi daring, mogok makan
Formal	Terstruktur dalam mekanisme resmi pemerintahan	Musrenbang, forum konsultasi publik

Tipologi	Ciri utama	Contoh
Informal	Tidak terstruktur, berbasis jaringan sosial sehari-hari	Diskusi warung kopi yang berujung tekanan sosial kolektif

Keempat tipologi ini tidak saling eksklusif — partisipasi konvensional dapat sekaligus formal (memilih dalam pemilu yang diatur negara), sementara partisipasi nonkonvensional dapat bersifat informal (gerakan spontan warga melalui grup percakapan daring).

6.4.2 Faktor Pendorong Mobilisasi Sosial

Teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) menekankan bahwa aksi kolektif memerlukan sumber daya — dana, jaringan, keahlian organisasi — bukan sekadar kekecewaan bersama. Teori peluang politik (*political opportunity theory*) menekankan bahwa keberhasilan mobilisasi bergantung pada celah struktural yang membuka ruang aksi, seperti pemilu mendatang atau perpecahan elite lokal.

- Kepemimpinan lokal: tokoh penggerak yang memiliki kepercayaan komunitas untuk mengoordinasikan aksi.
- Jaringan sosial: ikatan antarwarga (kekerabatan, organisasi keagamaan, kelompok tani) yang mempercepat penyebaran informasi dan ajakan bertindak.
- Sumber daya: dana, keahlian, dan akses media untuk mengorganisasikan dan mempertahankan aksi kolektif.
- Peluang politik: momentum struktural seperti pemilu, pergantian pejabat, atau sorotan media yang membuka ruang aksi lebih aman dan efektif.

Pada kotak pemantik, partisipasi rendah dalam isu penggusuran (dibanding partisipasi tinggi dalam pemilu) dapat dijelaskan oleh minimnya sumber daya dan jaringan terorganisasi warga nelayan, serta risiko struktural yang lebih tinggi ketika berhadapan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah dibanding sekadar memilih dalam bilik suara.

6.4.3 Mengukur Efektivitas Partisipasi terhadap Kebijakan Lokal

Efektivitas partisipasi tidak diukur dari jumlah warga yang terlibat semata, melainkan dari sejauh mana suara warga benar-benar mengubah arah kebijakan. Partisipasi yang masif namun tidak berpengaruh pada keputusan akhir (partisipasi semu) berbeda signifikan dari partisipasi yang lebih kecil namun menentukan (partisipasi substantif).

■ 6.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: DUA KASUS PARTISIPASI: DESA BANTAYA PESISIR DAN KELURAHAN KARANG MULYA

Di Desa Bantaya Pesisir, sekelompok kecil nelayan yang tergabung dalam koperasi berhasil membatalkan rencana reklamasi pantai setelah mengorganisasi petisi, menggandeng media lokal, dan memanfaatkan momentum menjelang pemilihan kepala daerah untuk menekan calon petahana.

Di Kelurahan Karang Mulya, ratusan warga menghadiri forum konsultasi publik tentang rencana pembangunan pasar, tetapi keputusan akhir tetap sesuai rencana awal pemerintah kota karena

warga hadir tanpa organisasi yang solid dan tidak memiliki jaringan media atau tokoh penggerak yang efektif.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Klasifikasikan tipologi partisipasi pada kedua kasus (konvensional/nonkonvensional, formal/informal).
2. Bandingkan faktor mobilisasi sosial (kepemimpinan, jaringan, sumber daya, peluang politik) yang hadir di Bantaya Pesisir dan yang absen di Karang Mulya.
3. Berdasarkan kedua kasus, rumuskan satu kesimpulan tentang syarat agar partisipasi masyarakat benar-benar efektif memengaruhi kebijakan.

■ 6.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 9 — TIPOLOGI PARTISIPASI MASYARAKAT

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak paparan tentang empat tipologi partisipasi; membaca dua ringkasan kasus partisipasi dari daerah berbeda di Indonesia.
Luring (tatap muka)	Diskusi kelompok kecil mengklasifikasikan berbagai contoh partisipasi (dari berita atau pengalaman mahasiswa) ke dalam empat tipologi, dilanjutkan pembahasan pleno.
Penugasan dan luaran	Tabel klasifikasi tipologi partisipasi: memetakan dua kasus nyata ke dalam matriks tipologi (jenis partisipasi × faktor pendorong), dilengkapi narasi analisis 400–600 kata per kasus; dikumpulkan melalui LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project melanjutkan pengumpulan data lapangan (wawancara/observasi) di lokus masing-masing.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 10 — FAKTOR PENDORONG MOBILISASI SOSIAL

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Membaca ringkasan teori mobilisasi sumber daya dan teori peluang politik; merespons forum LMS dengan mengidentifikasi faktor mobilisasi pada satu kasus pilihan sendiri.
Luring (tatap muka)	Studi kasus mendalam di kelas: menganalisis efektivitas partisipasi masyarakat pada satu kasus, mengidentifikasi mekanisme mobilisasi, hambatan struktural/kultural, dan diskusi rekomendasi berbasis teori.
Penugasan dan luaran	Laporan analisis kasus mendalam (individual): analisis efektivitas partisipasi masyarakat pada satu kasus di KTI yang dipilih mahasiswa, 800–1.000 kata, mencakup identifikasi mekanisme mobilisasi, hambatan struktural/kultural, dan rekomendasi berbasis teori; diunggah ke LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project menyerahkan transkrip/catatan lapangan kepada dosen untuk diverifikasi.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 11 — PENDALAMAN TIPOLOGI PARTISIPASI: STUDI KASUS LINTAS DAERAH KTI

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Membaca satu kasus tambahan partisipasi warga di daerah KTI yang berbeda konteks geografis (pesisir, pegunungan, atau kepulauan terpencil) dari kasus-kasus sebelumnya.
Luring (tatap muka)	Diskusi kelompok kecil membandingkan kasus tambahan ini dengan kasus Bantaya Pesisir dan Karang Mulya pada subbab 6.5, menekankan bagaimana konteks geografis dan budaya lokal memengaruhi bentuk partisipasi yang muncul.
Penugasan dan luaran	Catatan diskusi kelompok kecil dan poin-poin perbandingan lintas kasus (portofolio individu, tidak dinilai terpisah namun menjadi bahan latihan subbab 6.8).
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 12 — SINTESIS PARTISIPASI DAN MOBILISASI; JEMBATAN MENUJU KEKUASAAN LOKAL

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Membaca artikel pendek yang menghubungkan pola partisipasi/mobilisasi dengan kontestasi kekuasaan lokal, sebagai jembatan menuju Unit 6.
Luring (tatap muka)	Sesi sintesis kelas: merangkum benang merah tipologi partisipasi dan faktor mobilisasi dari minggu 9–11, serta diskusi awal tentang bagaimana mobilisasi sosial dapat berkembang menjadi basis dukungan politik (klientelisme, kontestasi elektoral) yang akan dibahas di Unit 6.
Penugasan dan luaran	Refleksi tertulis singkat (300–400 kata) tentang keterkaitan antara partisipasi/mobilisasi dan kekuasaan lokal, diunggah ke LMS UNISAN.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project mengonsultasikan draf bab analisis (komparasi dua daerah, klasifikasi tipologi partisipasi) kepada dosen.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 6.7 Rangkuman

- Empat tipologi partisipasi — konvensional, nonkonvensional, formal, informal — dapat saling tumpang tindih dalam satu kasus nyata.
- Mobilisasi sosial didorong oleh empat faktor utama: kepemimpinan lokal, jaringan sosial, sumber daya, dan peluang politik.
- Efektivitas partisipasi diukur dari pengaruh nyata terhadap keputusan, bukan sekadar jumlah warga yang terlibat.
- Konteks geografis dan budaya lokal KTI memengaruhi bentuk dan efektivitas partisipasi masyarakat yang muncul.

■ 6.8 Latihan

LATIHAN UNIT 5

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

- Partisipasi yang berlangsung di luar saluran formal negara dan bersifat konfrontatif, seperti demonstrasi, tergolong partisipasi
 - konvensional
 - nonkonvensional
 - formal
 - pasif
 - legal-rasional
- Teori yang menekankan bahwa aksi kolektif memerlukan dana, jaringan, dan keahlian organisasi disebut
 - teori peluang politik

- b. teori mobilisasi sumber daya
 - c. teori fungsionalisme
 - d. teori interaksionisme
 - e. teori legitimasi
3. Pada kasus Desa Bantaya Pesisir, faktor peluang politik yang dimanfaatkan warga adalah
- a. bantuan pemerintah pusat
 - b. momentum menjelang pemilihan kepala daerah
 - c. liburan nasional
 - d. musim panen
 - e. perubahan cuaca
4. Partisipasi yang masif tetapi tidak memengaruhi keputusan akhir disebut
- a. partisipasi substantif
 - b. partisipasi semu
 - c. partisipasi informal
 - d. partisipasi elektoral
 - e. partisipasi deliberatif
5. Faktor mobilisasi sosial yang tidak hadir pada kasus Kelurahan Karang Mulya adalah
- a. jumlah warga yang hadir
 - b. kepemimpinan dan jaringan yang solid
 - c. lokasi forum
 - d. waktu pelaksanaan forum
 - e. jumlah pejabat yang hadir

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan empat tipologi partisipasi masyarakat beserta satu contoh masing-masing dari konteks Indonesia, lalu jelaskan mengapa satu tindakan partisipasi bisa masuk ke lebih dari satu tipologi sekaligus.
7. Bandingkan kasus Desa Bantaya Pesisir dan Kelurahan Karang Mulya menggunakan empat faktor mobilisasi sosial, lalu simpulkan syarat utama agar partisipasi masyarakat efektif memengaruhi kebijakan.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 6.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 6.3 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Demonstrasi adalah contoh partisipasi nonkonvensional.
2	b	Resource mobilization theory menekankan pentingnya sumber daya bagi aksi kolektif.
3	b	Warga memanfaatkan momentum pilkada untuk menekan calon petahana.
4	b	Partisipasi semu terjadi ketika kehadiran warga tidak benar-benar mengubah keputusan.
5	b	Warga hadir dalam jumlah besar tetapi tanpa organisasi dan tokoh penggerak yang solid.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: definisi dan contoh empat tipologi; penjelasan tumpang tindih kategori dengan contoh konkret (misalnya memilih dalam pemilu = konvensional sekaligus formal).

Tabel 6.4 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Definisi dan contoh empat tipologi	15
Penjelasan tumpang tindih kategori	10
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: perbandingan sistematis keempat faktor pada kedua kasus; kesimpulan bahwa kombinasi kepemimpinan, jaringan, sumber daya, dan momentum peluang politik menentukan efektivitas partisipasi.

Tabel 6.5 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Perbandingan empat faktor	15
Kesimpulan syarat efektivitas	10
Jumlah	25

■ 6.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 6.4.1 tentang empat tipologi partisipasi dan klasifikasikan ulang satu pengalaman partisipasi Anda sendiri.
- Diskusikan kembali kasus Bantaya Pesisir dan Karang Mulya di forum LMS, fokus pada faktor yang belum Anda identifikasi dengan tepat.

- Kerjakan ulang laporan analisis kasus mendalam dengan menambahkan identifikasi faktor peluang politik yang mungkin terlewat.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca Scott (1985) *Weapons of the Weak* tentang bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang tidak selalu tampak sebagai partisipasi formal.
- Cari satu kasus mobilisasi sosial berskala nasional di Indonesia dan analisis menggunakan keempat faktor mobilisasi sosial pada unit ini.

■ 6.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Pernahkah Anda terlibat dalam bentuk partisipasi konvensional atau nonkonvensional? Ceritakan secara singkat.
2. Menurut Anda, faktor mobilisasi mana (kepemimpinan, jaringan, sumber daya, peluang politik) paling sulit dibangun di daerah asal Anda?
3. Bagaimana pengalaman kelompok Final Project Anda selama proses pengumpulan data lapangan sejauh ini?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Creativity — Merumuskan rekomendasi kreatif agar partisipasi warga yang kurang terorganisasi dapat lebih efektif.

Service — Menaruh perhatian pada kelompok yang partisipasinya kurang efektif, seperti warga di Kelurahan Karang Mulya.

Nationalism — Memahami partisipasi masyarakat sebagai fondasi demokrasi yang perlu diperkuat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk KTI.

■ 6.12 Referensi Unit

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.

Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB VII · UNIT 6 · MINGGU 13–15

06

KEPEMILUAN, KLIENTELISME, DAN GERAKAN SOSIAL

Dinamika kekuasaan lokal, kontestasi elektoral, dan sintesis akhir semester

Sub-CPMK6

CPL-03 · CPL-06

Bobot 15%

■ 7.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK6

Mengevaluasi dinamika kekuasaan lokal dalam konteks pemilihan dan kontestasi politik daerah — termasuk praktik klientelisme, politik identitas, atau patronase — dengan menyajikan analisis kritis berbasis teori sosiologi pemerintahan dan bukti lapangan.

Indikator: mahasiswa mampu

- Mengidentifikasi dan membedakan praktik klientelisme, patronase, dan politik identitas sebagai fenomena dalam kontestasi politik daerah
- Menganalisis relasi struktur sosial, relasi kuasa lokal, dan proses elektoral berdasarkan teori sosiologi pemerintahan
- Menganalisis faktor struktural dan kultural pendorong gerakan sosial lokal serta relasinya dengan dinamika kekuasaan lokal
- Menyintesiskan seluruh kerangka konseptual sosiologi pemerintahan yang telah dipelajari sepanjang semester ke dalam satu argumen analitik yang koheren

Tabel 7.1 Kedudukan Sub-CPMK6 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK3 — mengevaluasi fenomena partisipasi masyarakat, mobilisasi sosial, dan dinamika kekuasaan lokal — termasuk isu pemilihan, gerakan sosial, dan kontestasi politik di tingkat daerah — dengan menghasilkan laporan analisis kritis yang menyajikan argumen berbasis teori sosiologi pemerintahan dan bukti lapangan.
CPL yang didukung	CPL-03 (8%); CPL-06 (7%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	15% dari nilai akhir — Final Project 7% dan UAS 8%
Estimasi waktu belajar	3 minggu × 510 menit = 1.530 menit (25,5 jam): PB 450 menit, PT 540 menit, KM 540 menit

■ 7.2 Pemantik

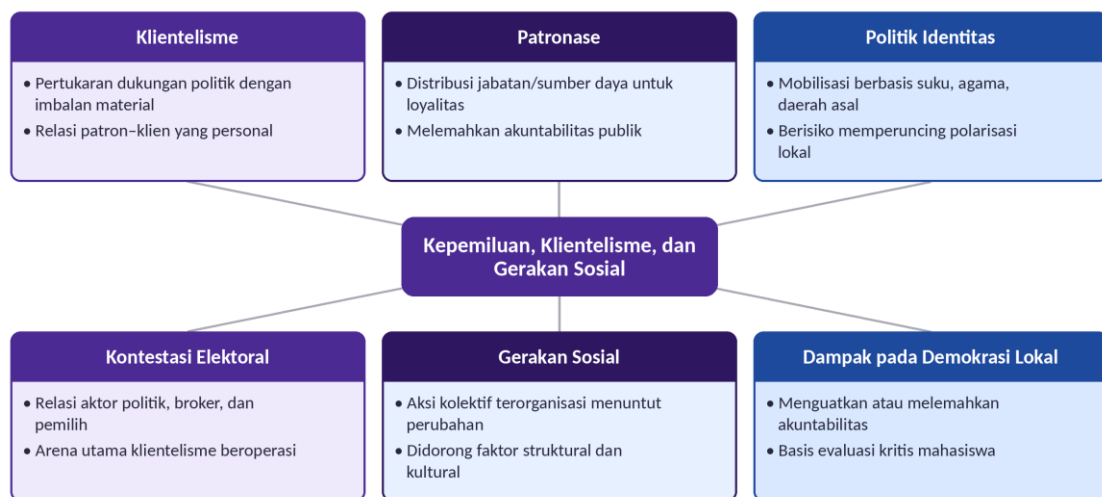
PEMANTIK

Menjelang pemilihan kepala daerah, seorang calon membagikan sembako dan bantuan tunai langsung ke rumah-rumah warga di sebuah kabupaten. Sebagian warga menerima bantuan tersebut sambil berkata, "terima uangnya, tapi pilihan tetap rahasia saya sendiri."

1. Apakah tindakan tersebut tergolong klientelisme? Apakah strategi tersebut pasti berhasil mengubah pilihan warga?
2. Bagaimana relasi kuasa antara calon, broker (tim sukses), dan pemilih dapat dijelaskan menggunakan konsep-konsep yang telah Anda pelajari sepanjang semester?

■ 7.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menghubungkan tiga fenomena kontestasi politik daerah (klientelisme, patronase, politik identitas) dengan gerakan sosial dan dampaknya terhadap demokrasi lokal — sekaligus menjadi kerangka sintesis akhir semester.



Gambar 7.1 Peta Konsep Unit 6

■ 7.4 Uraian Materi

7.4.1 Klientelisme, Patronase, dan Politik Identitas

Tabel 7.2 Tiga Fenomena Kontestasi Politik Daerah

Fenomena	Definisi	Contoh dalam kontestasi lokal
Klientelisme	Pertukaran dukungan politik dengan imbalan material secara personal dan langsung	Pembagian sembako atau uang tunai menjelang pemungutan suara
Patronase	Distribusi jabatan atau akses sumber daya negara sebagai imbalan loyalitas politik	Pengangkatan pendukung tim sukses ke posisi strategis di pemerintahan setelah menang

Fenomena	Definisi	Contoh dalam kontestasi lokal
Politik identitas	Mobilisasi dukungan berdasarkan kesamaan suku, agama, atau daerah asal	Kampanye yang menekankan kesamaan identitas kandidat dengan kelompok pemilih tertentu

Ketiganya sering berjalan beriringan dalam kontestasi lokal, tetapi memiliki mekanisme dan target yang berbeda: klientelisme bekerja pada level individu pemilih, patronase bekerja pada level jaringan pendukung pascakemenangan, dan politik identitas bekerja pada level mobilisasi kelompok.

7.4.2 Relasi Aktor Politik Lokal, Broker, dan Pemilih

Klientelisme jarang berlangsung dua arah langsung antara kandidat dan pemilih; biasanya melibatkan broker (tim sukses, tokoh RT/RW, atau makelar suara) yang memobilisasi jaringan sosialnya sendiri untuk menyalurkan bantuan dan memantau "kepatuhan" pemilih. Relasi ini memanfaatkan struktur sosial dan jaringan kepercayaan lokal yang telah dipelajari pada unit-unit sebelumnya.

Dampak klientelisme dan patronase terhadap tata kelola pemerintahan daerah pasca-kepemiluan cenderung negatif: alokasi anggaran dan jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas politik dibanding kompetensi atau kebutuhan publik, sehingga melemahkan akuntabilitas dan representasi.

7.4.3 Gerakan Sosial dan Kekuasaan Lokal

Gerakan sosial adalah aksi kolektif yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan dibanding partisipasi spontan, didorong oleh faktor struktural (ketimpangan akses sumber daya, marginalisasi kelompok tertentu) dan faktor kultural (narasi bersama tentang ketidakadilan yang perlu diperjuangkan). Gerakan sosial lokal dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi kekuasaan lokal yang terbentuk lewat klientelisme dan patronase, tetapi juga dapat dikooptasi oleh elite lokal jika tidak memiliki basis organisasi yang kuat.

Peran gerakan sosial dalam demokratisasi dan partisipasi akar rumput terletak pada kemampuannya membuka ruang tawar-menawar baru bagi kelompok yang selama ini termarginalkan dari kontestasi politik formal.

7.4.4 Menyintesis Kerangka Sosiologi Pemerintahan Satu Semester

Unit ini menjadi titik sintesis: struktur sosial dan relasi kuasa (Unit 1) mendasari legitimasi dan institusi (Unit 2); hubungan pusat–daerah dan kelembagaan lokal (Unit 3) membentuk konteks demokrasi akar rumput (Unit 4); partisipasi dan mobilisasi (Unit 5) dapat berkembang menjadi basis dukungan politik yang justru rentan dibajak oleh klientelisme dan patronase, atau sebaliknya menguat menjadi gerakan sosial yang menuntut akuntabilitas (Unit 6). Kerangka inilah yang perlu diintegrasikan dalam makalah akhir individual.

■ 7.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: KONTESTASI PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN NUSA DAMAI

Menjelang pemilihan bupati di Kabupaten Nusa Damai, salah satu pasangan calon membangun jaringan broker di setiap kecamatan yang membagikan bantuan sembako dan menjanjikan

proyek infrastruktur desa bagi wilayah yang memberikan dukungan tinggi. Setelah menang, sejumlah kepala desa pendukung diangkat menjadi pengurus program bantuan sosial kabupaten.

Setahun kemudian, sekelompok pemuda dan nelayan yang merasa wilayahnya tidak mendapat bagian proyek infrastruktur mulai mengorganisasi forum warga lintas desa untuk menuntut transparansi alokasi anggaran, meski mendapat tekanan dari aparat desa yang berafiliasi dengan bupati terpilih.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Identifikasi unsur klientelisme dan patronase pada kasus ini secara terpisah, dengan bukti masing-masing.
2. Jelaskan faktor struktural dan kultural yang mendorong munculnya gerakan warga lintas desa tersebut.
3. Berdasarkan seluruh kerangka sosiologi pemerintahan yang telah Anda pelajari satu semester, evaluasilah secara kritis apakah demokrasi lokal di Kabupaten Nusa Damai menguat atau melemah pascakepemiluan ini, dan mengapa.

■ 7.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 13 — KLIENTELISME, PATRONASE, DAN POLITIK IDENTITAS

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak paparan tentang tiga fenomena kontestasi politik daerah; membaca satu kasus pilkada daerah yang memuat unsur klientelisme dari media massa.
Luring (tatap muka)	Kerja kelompok kecil atau berpasangan memetakan satu kasus kepemiluan daerah di KTI menggunakan diagram alur yang menunjukkan hubungan antara aktor, praktik klientelisme/patronase/identitas, dan hasil kontestasi.
Penugasan dan luaran	Peta konsep dinamika kepemiluan (individual atau berpasangan): diagram alur kasus kepemiluan daerah di KTI dilengkapi keterangan naratif 300–400 kata, diunggah ke LMS UNISAN.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 14 — KEPEMILUAN DAERAH DAN GERAKAN SOSIAL LOKAL

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Membaca ringkasan teori gerakan sosial (mobilisasi sumber daya dan teori konflik) serta satu kasus gerakan sosial lokal di KTI.
Luring (tatap muka)	Diskusi kelas tentang relasi antara klientelisme/patronase pascakepemiluan dan kemunculan gerakan sosial sebagai respons warga; dosen memberi umpan balik atas draf esai analitis mahasiswa.
Penugasan dan luaran	Esai analitis individual (1.000–1.200 kata): evaluasi kritis dampak klientelisme/patronase terhadap tata kelola pemerintahan lokal pascakepemiluan pada satu kasus di KTI, mencakup analisis berbasis teori, bukti lapangan, dan rekomendasi alternatif kebijakan.
Proyek kelompok	Kelompok Final Project menyerahkan draf laporan terpadu lengkap untuk umpan balik dosen sebelum finalisasi minggu 14–15.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 15 — SINTESIS SEMESTER DAN PERSIAPAN MAKALAH AKHIR

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak paparan sintesis yang menghubungkan seluruh unit (struktur sosial–legitimasi–hubungan pusat–daerah–demokrasi akar rumput–partisipasi–kekuasaan lokal) sebagai kerangka menyusun makalah akhir.
Luring (tatap muka)	Sesi klinik penulisan makalah akhir: mahasiswa memaparkan argumen pokok dan kerangka analisis makalah masing-masing secara singkat untuk mendapat umpan balik dosen dan rekan sebelum penulisan penuh.
Penugasan dan luaran	Draf awal makalah akhir individual (ringkasan 500–700 kata berisi argumen pokok, kerangka analisis, dan garis besar temuan), dikumpulkan sebelum sesi luring sebagai persiapan presentasi; makalah lengkap dikumpulkan pada minggu 16 (UAS).
Proyek kelompok	Finalisasi laporan riset terpadu, poster akademik (A1 bilingual), dan slide presentasi ; kelompok Final Project melaksanakan presentasi oral dan sidang final (15 menit paparan + 10 menit tanya jawab) di depan dosen dan mahasiswa, lalu menyerahkan laporan final, poster, dan rekaman video presentasi.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 7.7 Rangkuman

- Klientelisme (level individu pemilih), patronase (level jaringan pendukung), dan politik identitas (level mobilisasi kelompok) adalah tiga fenomena berbeda yang sering berjalan beriringan dalam kontestasi politik daerah.
- Broker menjadi penghubung penting antara kandidat dan pemilih, memanfaatkan struktur sosial dan jaringan kepercayaan lokal.

- Gerakan sosial lokal, didorong faktor struktural dan kultural, dapat menjadi penyeimbang terhadap dominasi kekuasaan hasil klientelisme dan patronase.
- Unit ini menyintesis seluruh kerangka sosiologi pemerintahan satu semester: dari struktur sosial dan legitimasi hingga kontestasi kekuasaan lokal.

■ 7.8 Latihan

LATIHAN UNIT 6

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Distribusi jabatan atau akses sumber daya negara sebagai imbalan loyalitas politik pascakemenangan disebut
 - a. klientelisme
 - b. patronase
 - c. politik identitas
 - d. legitimasi
 - e. desentralisasi
2. Pihak yang menghubungkan kandidat dengan pemilih dalam praktik klientelisme, memanfaatkan jaringan sosial lokal, disebut
 - a. inkumben
 - b. broker
 - c. panwaslu
 - d. KPU
 - e. partai nasional
3. Faktor yang membedakan gerakan sosial dari partisipasi spontan biasa adalah
 - a. jumlah peserta yang sedikit
 - b. tingkat organisasi dan keberlanjutan aksi kolektif
 - c. dilakukan secara individual
 - d. tidak memiliki tujuan
 - e. selalu didanai pemerintah
4. Pada kasus Kabupaten Nusa Damai, unsur patronase ditunjukkan oleh
 - a. pembagian sembako menjelang pemilu
 - b. pengangkatan pendukung sebagai pengurus program bantuan sosial
 - c. kampanye identitas daerah
 - d. forum warga lintas desa
 - e. protes nelayan
5. Dampak umum klientelisme dan patronase terhadap tata kelola pemerintahan daerah adalah

- a. menguatkan akuntabilitas
- b. melemahkan akuntabilitas dan representasi berbasis kompetensi
- c. meningkatkan transparansi anggaran
- d. memperkuat independensi birokrasi
- e. tidak berdampak apa pun

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan perbedaan klientelisme, patronase, dan politik identitas, lalu identifikasi ketiganya pada kasus Kabupaten Nusa Damai dengan bukti masing-masing.
7. Susun argumen sintesis singkat (1 paragraf) yang menghubungkan minimal tiga konsep dari unit-unit sebelumnya (misalnya legitimasi, kelembagaan lokal, partisipasi) untuk menjelaskan mengapa gerakan warga lintas desa muncul di Kabupaten Nusa Damai.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 7.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 7.3 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Patronase bekerja pada level jaringan pendukung melalui distribusi jabatan/sumber daya.
2	b	Broker adalah perantara yang memobilisasi jaringan sosialnya untuk kandidat.
3	b	Gerakan sosial lebih terorganisasi dan berkelanjutan dibanding partisipasi spontan.
4	b	Pengangkatan pendukung ke posisi pengurus program adalah bentuk patronase.
5	b	Klientelisme/patronase cenderung mengutamakan loyalitas politik di atas kompetensi dan kebutuhan publik.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: definisi tiga fenomena; identifikasi klientelisme (sembako), patronase (pengangkatan pendukung), dan politik identitas bila relevan pada kasus, dengan bukti tekstual dari deskripsi kasus.

Tabel 7.4 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan tiga definisi	12
Ketepatan identifikasi pada kasus	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: argumen yang secara eksplisit mengaitkan minimal tiga konsep lintas unit secara koheren, bukan sekadar menyebutkan istilah secara terpisah, untuk menjelaskan kemunculan gerakan warga.

Tabel 7.5 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Keterkaitan minimal tiga konsep	15
Koherensi argumen	10
Jumlah	25

■ 7.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 7.4.1 tentang perbedaan klientelisme, patronase, dan politik identitas, lalu buat tabel perbandingan sendiri dengan contoh dari daerah Anda.
- Diskusikan kembali kasus Kabupaten Nusa Damai di forum LMS, fokus pada bagian yang menjelaskan gerakan sosial yang belum terjawab tuntas.
- Konsultasikan kerangka argumen makalah akhir Anda dengan dosen sebelum menuliskannya secara penuh.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca Scott (1985) *Weapons of the Weak* dan Tilly (2007) *Democracy* untuk memperdalam pemahaman tentang relasi kekuasaan lokal dan gerakan sosial.
- Bandingkan kasus Kabupaten Nusa Damai dengan satu kasus pilkada nyata di media massa yang memuat unsur klientelisme atau gerakan sosial pascakepemiluan.

■ 7.11 Refleksi dan Nilai ICNHS-N

REFLEKSI

1. Pernahkah Anda menyaksikan praktik klientelisme, patronase, atau politik identitas di lingkungan Anda? Bagaimana dampaknya?
2. Menurut Anda, apakah gerakan sosial lokal cukup efektif menyeimbangkan dominasi kekuasaan hasil klientelisme? Mengapa?
3. Konsep mana dari seluruh mata kuliah semester ini yang paling mengubah cara pandang Anda terhadap pemerintahan? Jelaskan secara singkat sebagai persiapan makalah akhir.

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Mengevaluasi dampak klientelisme dan patronase secara jujur dan berbasis bukti, tanpa memihak kepentingan politik tertentu.

Service — Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan yang berorientasi pada penguatan akuntabilitas dan representasi warga.

Nationalism — Memahami penguatan demokrasi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

■ 7.12 Referensi Unit

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.

Sinamo, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jala Permata Aksara.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.

Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.

PERSIAPAN UAS: SINTESIS SATU SEMESTER DAN MAKALAH AKHIR

UAS (minggu 16) mengevaluasi seluruh materi semester dengan penekanan pada minggu 9–15 (partisipasi, mobilisasi, pemilihan, klientelisme, gerakan sosial), sekaligus menjadi batas pengumpulan **makalah akhir individual** (3.000–4.000 kata) yang mengintegrasikan seluruh capaian pembelajaran semester.

- Tinjau kembali matriks tiga perspektif teoretis (Unit 1) dan gunakan sebagai kerangka analisis utama dalam makalah akhir.
- Pastikan makalah akhir memuat pendahuluan dengan pernyataan tesis, kerangka teoretis, analisis kasus/data (dapat memanfaatkan temuan Final Project kelompok Anda), diskusi integratif lintas topik semester, simpulan, dan daftar pustaka terverifikasi.
- Periksa kembali seluruh tugas individual sepanjang semester (matriks, telaah kasus, laporan lapangan, esai analitis) sebagai bahan mentah yang dapat diolah menjadi bagian dari makalah akhir.
- Kelola waktu: mulai menulis draf penuh sejak minggu 15, jangan menunggu hingga minggu 16.

BAB VIII · EVALUASI SUMATIF

VIII

ASESMEN SUMATIF

Rekonsiliasi penilaian, perhitungan capaian, dan instrumen ujian

Sub-CPMK1–Sub-CPMK6

CPL-02 · CPL-03 · CPL-06

Total bobot 100%

■ 8.1 Prinsip Asesmen

Asesmen dirancang berdasarkan keselarasan konstruktif OBE: setiap instrumen mengukur Sub-CPMK tertentu, dan setiap Sub-CPMK diukur oleh sedikitnya satu instrumen sumatif.

1. **Sahih (valid).** Instrumen mengukur kemampuan pada indikator Sub-CPMK.
2. **Andal (reliabel).** Penilaian menggunakan rubrik tertulis yang dibagikan sejak awal.
3. **Adil dan transparan.** Kriteria, bobot, tenggat, dan sanksi keterlambatan diumumkan melalui modul dan LMS.
4. **Autentik.** Final Project menuntut mahasiswa menganalisis dinamika pemerintahan lokal nyata berbasis data lapangan di satu kabupaten/kota atau desa/kelurahan KTI.
5. **Edukatif.** Kuis, latihan unit, portofolio tugas mingguan, dan evaluasi sejawat bersifat formatif dan memberi umpan balik.
6. **Berintegritas.** Fabrikasi data lapangan, plagiarisme, atau penggunaan GenAI tanpa izin pada ujian mengakibatkan pembatalan nilai instrumen tersebut.

■ 8.2 Rekonsiliasi Komponen Penilaian dan Sub-CPMK

Tabel berikut adalah acuan resmi pemetaan nilai, mengikuti tabel rekonsiliasi komponen penilaian RPS (15/13/20/17/20/15) sesuai keputusan pada Bagian 1, dengan komponen Tugas Analisis Kasus dan Studi Lapangan digabung menjadi komponen Final Project (35%).

Tabel 8.1 Rekonsiliasi Komponen Penilaian × Sub-CPMK

Sub-CPMK	Kuis Teori	Final Project	UTS	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	8	–	7	–	15
Sub-CPMK2	–	7	6	–	13
Sub-CPMK3	7	7	6	–	20
Sub-CPMK4	–	8	–	9	17
Sub-CPMK5	–	6	6	8	20
Sub-CPMK6	–	7	–	8	15
Bobot komponen (%)	15	35	25	25	100

Versi bobot: tabel rekonsiliasi komponen RPS. Komponen asli Tugas Analisis Kasus (20%) dan Studi Lapangan (15%) digabung menjadi Final Project (35%) mengikuti keputusan Bagian 1 subbab 1.7, karena Final Project menggantikan sebagian besar tugas individual yang semula mengisi kedua komponen tersebut. Nilai Final Project (satu skor per kelompok, 0–100) diisikan sama pada kelima sel Sub-CPMK2–6, lalu dihitung tertimbang menurut bobot masing-masing sel.

Instrumen yang mengisi setiap sel ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 8.2 Instrumen Pengisi Setiap Sel Rekonsiliasi

Komponen	Sub-CPMK	Instrumen
Kuis Teori	Sub-CPMK1 (8)	Kuis klasifikasi konsep (mg 1)
	Sub-CPMK3 (7)	Kuis tulis singkat penerapan perspektif (mg 3)
Final Project	Sub-CPMK2 (7)	Bagian kerangka konseptual Final Project yang mengaplikasikan teori pada isu legitimasi/institusi (mg 4–6)
	Sub-CPMK3 (7)	Bagian analisis komparatif hubungan pusat–daerah Final Project (mg 10–11)
	Sub-CPMK4 (8)	Bagian data lapangan dan metodologi Final Project — observasi/wawancara ≥5 informan (mg 7–9)
	Sub-CPMK5 (6)	Bagian klasifikasi tipologi partisipasi dan mobilisasi sosial Final Project (mg 10–11)
	Sub-CPMK6 (7)	Bagian evaluasi kekuasaan lokal, sintesis, dan rekomendasi kebijakan Final Project (mg 12–15)
UTS	Sub-CPMK1, 2, 3, 5 (7/6/6/6)	Ujian tertulis (mg 8); butir Sub-CPMK5 bersifat pertanyaan konseptual umum tentang partisipasi (lihat subbab 8.4)
UAS	Sub-CPMK4, 5, 6 (9/8/8)	Ujian integratif dengan penekanan mg 9–15, termasuk makalah akhir individual (mg 16)

■ 8.3 Perhitungan Nilai dan Ketercapaian untuk SI-OBE

Setiap instrumen dinilai pada skala 0–100, lalu diolah dalam empat langkah berikut sesuai struktur data SI-OBE UNISAN.

1. **Nilai Sub-CPMK.** $N_{Subj} = \sum (wkj \times skj) \div \sum wkj$, dengan wkj bobot sel pada Tabel 8.1 dan skj skor instrumen; untuk sel Final Project, skj adalah skor Final Project kelompok yang sama pada kelima Sub-CPMK yang diukurnya.
2. **Nilai akhir.** $NA = \sum (bj \times N_{Subj}) \div 100$; dikonversi ke huruf mutu menurut Tabel 1.11.
3. **Nilai CPMK.** Rata-rata tertimbang N_{Sub} dari Sub-CPMK anggotanya dengan bobot Sub-CPMK sebagai penimbang.
4. **Nilai CPL.** $NCPLc = \sum (mcj \times N_{Subj}) \div \sum mcj$, dengan mcj bobot kontribusi pada Tabel 1.6.

Mahasiswa dinyatakan **mencapai** suatu Sub-CPMK, CPMK, atau CPL jika nilainya ≥ 70 . Pada tingkat kelas, ketercapaian dilaporkan sebagai persentase mahasiswa yang mencapai ambang tersebut.

8.3.1 Contoh Perhitungan Satu Mahasiswa

Contoh berikut menggunakan data ilustrasi yang dihitung dengan kode program (Python); nilai Final Project kelompok pada contoh ini adalah 82 untuk seluruh anggota (tanpa penyesuaian kontribusi individu).

Tabel 8.3 Contoh Skor Instrumen, Nilai Sub-CPMK, dan Kontribusi ke Nilai Akhir

Sub-CPMK	Kuis	Final Project	UTS	UAS	NSub	Kontribusi ke NA
Sub-CPMK1	78	–	70	–	74,27	11,14
Sub-CPMK2	–	82	65	–	74,15	9,64
Sub-CPMK3	72	82	68	–	74,30	14,86
Sub-CPMK4	–	82	–	66	73,53	12,50
Sub-CPMK5	–	82	62	64	68,80	13,76
Sub-CPMK6	–	82	–	60	70,27	10,54
Nilai akhir					72,44	

Sebagai ilustrasi langkah 1, $N_{Sub5} = (6 \times 82 + 6 \times 62 + 8 \times 64) \div 20 = 68,80$. Nilai akhir 72,44 menghasilkan huruf mutu **C**. Mahasiswa ini belum mencapai Sub-CPMK5 (68,80), sehingga CPMK3 (69,43) juga belum tercapai, walaupun ketiga CPL tetap di atas ambang karena bobot Sub-CPMK1–4 yang sudah tercapai mengangkat rata-rata setiap CPL — contoh bahwa capaian CPL dapat tertutupi ketidaktercapaian pada satu Sub-CPMK di tingkat CPMK.

Tabel 8.4 Contoh Nilai CPMK dan CPL Seorang Mahasiswa

Capaian	Nilai	Status (≥ 70)
CPMK1	74,21	Tercapai
CPMK2	73,95	Tercapai
CPMK3	69,43	Belum tercapai
CPL-02	72,79	Tercapai
CPL-03	72,87	Tercapai
CPL-06	71,69	Tercapai

8.3.2 Contoh Ketercapaian CPL pada Tingkat Kelas

Tabel berikut memperlihatkan data ilustrasi sepuluh mahasiswa yang dibangkitkan dengan kode program dan tidak mewakili nilai mahasiswa sebenarnya.

Tabel 8.5 Contoh Ketercapaian CPL Kelas (Data Ilustrasi)

Mahasiswa	CPL-02	CPL-03	CPL-06	Nilai akhir
M01	51,89	57,64	55,41	54,70
M02	63,37	71,79	69,32	67,75
M03	54,42	53,62	54,17	54,11

Mahasiswa	CPL-02	CPL-03	CPL-06	Nilai akhir
M04	66,66	68,09	66,60	67,04
M05	62,00	65,67	64,71	63,95
M06	56,03	52,79	54,76	54,69
M07	54,24	59,74	59,69	57,63
M08	87,74	88,13	85,54	87,10
M09	72,08	66,07	65,97	68,32
M10	82,05	87,53	86,27	85,02
Rata-rata	65,05	67,11	66,24	
% ≥ 70	30,0%	30,0%	20,0%	

Pada contoh ini, persentase mahasiswa yang mencapai ambang berkisar 20%–30% pada ketiga CPL. Jika target program studi misalnya 75%, hasil ini menunjukkan CPL yang perlu diperkuat pada evaluasi mata kuliah (subbab 8.7), terutama CPL-06 yang persentasenya paling rendah pada contoh ini.

■ 8.4 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UTS

UTS mencakup materi minggu 1–7 (Sub-CPMK1–4) sesuai Tabel 1.7. Tabel rekonsiliasi RPS turut mengalokasikan 6% bobot UTS pada Sub-CPMK5, meskipun materinya baru diajarkan minggu 9–12; modul ini tetap mengikuti alokasi tersebut untuk penghitungan SI-OBE sesuai keputusan Bagian 1, tetapi butir terkait dirancang sebagai pertanyaan konseptual umum tentang partisipasi masyarakat yang dapat dijawab dari pengetahuan umum dan bacaan awal mahasiswa, bukan menguji materi Unit 5 secara spesifik.

Tabel 8.6 Kisi-kisi UTS

Sub-CPMK	Bobot NA	Skor total	Bagian A (konseptual)	Bagian B (telaah kasus)	Bagian C (partisipasi, umum)
Sub-CPMK1	7%	28	28	–	–
Sub-CPMK2	6%	24	–	24	–
Sub-CPMK3	6%	24	–	24	–
Sub-CPMK5	6%	24	–	–	24
Jumlah	25%	100	28	48	24

CONTOH BUTIR DAN NASKAH UTS

Contoh butir konseptual (Sub-CPMK1, Bagian A). Sumber legitimasi yang berdasarkan aturan dan prosedur formal yang disepakati bersama disebut legitimasi ... (a) tradisional, (b) karismatik, (c) legal-rasional, (d) substansial, (e) informal. Kunci: c.

Kasus untuk Bagian B. Kabupaten Sungai Damai (fiktif) memiliki dinas pelayanan yang bersertifikat ISO, tetapi 55% pengguna layanan mengaku pernah "titip" berkas melalui kenalan pegawai agar prosesnya lebih cepat.

B1. Nilai legitimasi prosedural dan substansial dinas tersebut secara terpisah, disertai argumen. (skor 12)

B2. Bandingkan pola hubungan pusat–daerah yang tersirat dari kasus ini dengan satu daerah lain yang Anda ketahui, menggunakan minimal satu dimensi desentralisasi. (skor 12)

Bagian C (konseptual umum, Sub-CPMK5). Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua dari empat tipologi partisipasi masyarakat yang Anda ketahui, beserta satu contoh masing-masing. (skor 24)

Tabel 8.7 Pedoman Jawaban UTS

Bagian	Pokok jawaban yang diharapkan
B1	Legitimasi prosedural tinggi (sertifikasi ISO); legitimasi substansial rendah (55% memakai jalur tidak resmi); argumen bahwa keduanya adalah dimensi berbeda.
B2	Perbandingan berdasarkan dimensi politik/administratif/fiskal desentralisasi dengan daerah lain, disertai data atau argumen yang relevan.
C	Definisi dan contoh dua dari empat tipologi (konvensional, nonkonvensional, formal, informal) sesuai kerangka umum yang telah diperkenalkan pada Unit 1–4.

Rubrik UTS pada RPS (ketepatan konsep, kedalaman analisis, koherensi argumen) digunakan dengan bobot operasional 30%, 40%, dan 30%.

■ 8.5 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UAS

UAS mencakup seluruh materi semester dengan penekanan minggu 9–15 sesuai RPS, dan menjadi batas pengumpulan makalah akhir individual (3.000–4.000 kata). Skor naskah 100 dibagi proporsional dengan bobot Sub-CPMK dalam UAS (9 : 8 : 8 dari 25).

Tabel 8.8 Kisi-kisi UAS

Sub-CPMK	Bobot NA	Skor soal	Indikator yang diukur	No. soal
Sub-CPMK4	9%	36	Demokrasi akar rumput dan relasi sosial pemerintah–masyarakat	1
Sub-CPMK5	8%	32	Tipologi partisipasi dan faktor mobilisasi sosial	2
Sub-CPMK6	8%	32	Klientelisme, patronase, politik identitas, dan gerakan sosial	3
Jumlah	25%	100		

CONTOH NASKAH UAS

Kasus. Menjelang pemilihan kepala desa di Desa Air Jernih (fiktif), musyawarah pemilihan calon tunggal hanya dihadiri tokoh yang dekat dengan kepala desa petahana. Setelah terpilih kembali, kepala desa membagikan bantuan program desa hanya kepada dusun-dusun yang mendukungnya dalam pemilihan sebelumnya. Sekelompok pemuda dari dusun yang tidak mendapat bantuan mulai mengorganisasi forum warga menuntut transparansi.

1. Evaluasi praktik demokrasi akar rumput dalam kasus ini menggunakan konsep relasi pemerintah-masyarakat (dialogis/paternalistik/transaksional). (skor 36)
2. Klasifikasikan tipologi partisipasi yang muncul dari kelompok pemuda tersebut dan identifikasi faktor mobilisasi sosial yang mendorongnya. (skor 32)
3. Identifikasi unsur klientelisme/patronase pada kasus ini dan evaluasi dampaknya terhadap demokrasi lokal, disertai satu rekomendasi kebijakan. (skor 32)

Jawaban dinilai dengan kriteria ketepatan konsep, kedalaman analisis, dan koherensi argumen, dengan bobot operasional 35%, 40%, dan 25%.

■ 8.6 Rubrik Tugas Lain

Rubrik lampiran RPS untuk Tugas Analisis Kasus dan Studi Lapangan berisi kriteria yang tidak sesuai dengan nama tugasnya (masing-masing menyerupai rubrik presentasi dan rubrik proyek umum); modul ini menggunakan rubrik operasional berikut yang disesuaikan dengan bentuk tugas sebenarnya. Rubrik Final Project mengikuti kriteria a–g pada Rencana Tugas RPS.

Tabel 8.9 Rubrik Tugas Analisis Kasus Individual (Sub-CPMK1, 2, 3, 5, 6)

Aspek	Bobot	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketepatan penerapan konsep/teori	30%	Tepat, mendalam, dan konsisten	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
Kedalaman analisis	30%	Kritis dan berbasis bukti/data	Memadai	Deskriptif	Tidak ada analisis
Struktur dan sistematika argumen	25%	Runtut: deskripsi–analisis–temuan–refleksi	Cukup runtut	Kurang runtut	Tidak terstruktur
Bahasa akademik dan integritas sumber	15%	Baku, sumber dikutip lengkap	Sedikit kekurangan	Banyak kekurangan	Tidak baku/tanpa sumber

Tabel 8.10 Rubrik Studi Lapangan Individual (Sub-CPMK4)

Aspek	Bobot	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kualitas instrumen (panduan wawancara/observasi)	25%	Relevan, terstruktur, dan etis	Memadai	Sebagian tidak relevan	Tidak layak digunakan
Pelaksanaan etis di lapangan	20%	Persetujuan dan kerahasiaan informan terjaga penuh	Memadai	Sebagian terabaikan	Tidak etis
Kelengkapan dokumentasi (transkrip/catatan)	25%	Lengkap dan terstruktur, ≥5 informan	Memadai	Sebagian tidak lengkap	Tidak memadai
Kedalaman analisis relasi sosial dan demokrasi akar rumput	30%	Kritis, menghubungkan data dengan konsep	Logis	Deskriptif	Tidak ada analisis

Rubrik Final Project menggunakan tujuh kriteria berbobot sesuai Rencana Tugas RPS, dengan total 100%.

Tabel 8.11 Rubrik Final Project (Rencana Tugas RPS)

Kriteria	Bobot	Deskripsi penilaian
a. Kerangka Teoretis & Perumusan Masalah	15%	Ketepatan dan kedalaman matriks perbandingan tiga teori sosiologi pemerintahan serta relevansi rumusan masalah dengan gejala pemerintahan nyata di KTI.
b. Kualitas Data Lapangan & Metodologi	20%	Kelengkapan transkrip/catatan lapangan ≥5 informan, kesesuaian panduan wawancara/observasi, dan keabsahan sumber sekunder.
c. Analisis Komparatif Hubungan Pusat–Daerah & Partisipasi	25%	Ketajaman analisis perbandingan minimal dua daerah, kejelasan klasifikasi tipologi partisipasi, dan identifikasi faktor mobilisasi sosial.
d. Evaluasi Demokrasi Akar Rumput & Dinamika Kekuasaan Lokal	20%	Kedalaman evaluasi kritis praktik demokrasi desa/kelurahan dan ketajaman analisis klientelisme/patronase/politik identitas berbasis bukti lapangan.
e. Rekomendasi Kebijakan & Kualitas Laporan Tertulis	10%	Relevansi, inovasi, dan kelayakan rekomendasi kebijakan; sistematika dan kepadatan argumen laporan.
f. Poster Akademik	5%	Kelengkapan komponen ilmiah poster, estetika visual, dan keterbacaan versi bilingual.
g. Presentasi Oral & Kemampuan Menjawab Pertanyaan	5%	Kejelasan penyampaian temuan, penguasaan materi, dan kemampuan menjawab pertanyaan kritis penguji.

■ 8.7 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Hasil asesmen digunakan untuk memperbaiki pembelajaran mengikuti siklus PPEPP dalam SPMI UNISAN.

Tabel 8.12 Siklus Evaluasi dan Perbaikan Mata Kuliah

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
Pengumpulan data	Rekam nilai per sel rekonsiliasi ke SI-OBE; kumpulkan kuesioner umpan balik modul (Lampiran C)	Dosen pengampu	Minggu 16
Analisis	Hitung ketercapaian Sub-CPMK, CPMK, dan CPL tingkat kelas	Dosen dan koordinator RMK	Setelah nilai final
Refleksi	Kaji penyebab: konflik bobot Sub-CPMK, pemetaan minggu Sub-CPMK5/6, atau ketiadaan Pustaka Utama dan rubrik di RPS awal	Tim RMK	Rapat evaluasi semester
Tindak lanjut	Selaraskan RPS: satukan versi bobot Sub-CPMK (matriks CPL vs rekonsiliasi komponen), perjas pemetaan minggu Sub-CPMK5–6 agar konsisten dengan isi mingguan, dan perbaiki label rubrik lampiran (Tugas Analisis Kasus dan Studi Lapangan) agar sesuai nama tugasnya	Dosen dan program studi	Sebelum semester berikutnya
Pelaporan	Laporkan ketercapaian CPL ke program studi	Koordinator RMK	Akhir tahun akademik

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
BPD	Badan Permusyawaratan Desa, lembaga yang menyalurkan aspirasi, menyusun peraturan desa, dan mengawasi kinerja pemerintah desa.
Broker politik	Perantara yang menghubungkan kandidat dengan pemilih dalam praktik klientelisme, memanfaatkan jaringan sosial lokal.
Desentralisasi	Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam dimensi politik, administratif, dan fiskal.
Demokrasi akar rumput	Praktik pengambilan keputusan yang melibatkan warga secara langsung di tingkat paling lokal.
Fungsionalisme	Perspektif teoretis yang memandang masyarakat sebagai sistem yang saling menopang menuju keseimbangan.
Gerakan sosial	Aksi kolektif yang terorganisasi dan berkelanjutan, didorong faktor struktural dan kultural, menuntut perubahan.
Institusi pemerintahan	Aturan main yang melembaga, baik formal maupun informal, yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan.
Interaksionisme simbolik	Perspektif teoretis yang memandang masyarakat sebagai hasil interaksi dan pemaknaan bersama antarindividu.
Klientelisme	Pertukaran dukungan politik dengan imbalan material secara personal dan langsung antara kandidat/broker dan pemilih.
Konflik (perspektif)	Perspektif teoretis yang memandang masyarakat sebagai arena perebutan sumber daya dan kekuasaan yang timpang.
Legitimasi	Pengakuan bahwa seseorang atau lembaga memiliki hak untuk memerintah.
Legitimasi prosedural	Keabsahan yang diperoleh karena mengikuti aturan atau prosedur formal.
Legitimasi substansial	Keabsahan yang diperoleh karena kinerja dianggap adil dan bermanfaat oleh warga.
Lembaga adat	Lembaga yang menjaga norma dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat setempat.
Mobilisasi sosial	Proses menggerakkan warga untuk melakukan aksi kolektif guna mencapai tujuan bersama.
Musyawarah desa	Forum pengambilan keputusan warga desa, mekanisme partisipasi formal tertinggi menurut UU Desa.
Otonomi daerah	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam kerangka NKRI.
Partisipasi konvensional	Partisipasi yang berlangsung melalui saluran yang diakui dan diatur negara.
Partisipasi nonkonvensional	Partisipasi yang berlangsung di luar saluran formal negara, kadang bersifat konfrontatif.

Istilah	Pengertian
Partisipasi semu	Partisipasi yang masif secara kehadiran namun tidak benar-benar memengaruhi keputusan akhir.
Patronase	Distribusi jabatan atau akses sumber daya negara sebagai imbalan loyalitas politik.
Peluang politik	Celah struktural yang membuka ruang bagi keberhasilan aksi kolektif atau mobilisasi sosial.
Politik identitas	Mobilisasi dukungan politik berdasarkan kesamaan suku, agama, atau daerah asal.
Relasi kuasa	Kemampuan satu pihak memengaruhi tindakan pihak lain, bersumber dari paksaan, otoritas, atau pengaruh.
Struktur sosial	Pola hubungan sosial yang relatif stabil dan terlembagakan dalam masyarakat.
Tipologi partisipasi	Klasifikasi bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan dimensi tertentu, misalnya konvensional/nonkonvensional dan formal/informal.

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka Utama

- Leftwich, A. (2004). *What is Politics? The Activity and Its Study* (2nd ed.). Polity Press.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Doubleday.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Turner, J. H. (2003). *The Structure of Sociological Theory* (7th ed.). Wadsworth.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan* (2nd ed.). Bumi Aksara.

B. Pustaka Pendukung

- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Sinamo, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jala Permata Aksara.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. Wiley.
- Burke, P. (2005). *History and Social Theory* (2nd ed.). Cornell University Press.
- Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Migdal, J. S. (2001). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

MODUL AJAR · SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

LAMPIRAN

■ Lampiran A. Templat Kerja

A.1 Proposal Singkat Final Project (Tahap 1, Minggu 1–3)

Unsur	Isian
Nama kelompok dan anggota (nama/NIM)	
Kabupaten/kota atau desa/kelurahan lokus	
Alasan pemilihan lokus	
Pertanyaan riset awal	
Pembagian peran anggota	

A.2 Panduan Wawancara/Observasi Lapangan

No	Pertanyaan terbuka / hal yang diobservasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	

A.3 Lembar Kontribusi Individu Final Project

Nama / NIM	Peran dan kontribusi	Tanda tangan

A.4 Log Kerja Mingguan Kelompok

Minggu	Kegiatan dan capaian	Kendala	Paraf ketua

A.5 Lembar Penilaian Sejawat Presentasi Final Project

Kriteria	Skor (1–4)	Komentar substantif
Kejelasan masalah dan kerangka teoretis		
Kualitas data lapangan dan metodologi		
Ketajaman analisis dan rekomendasi kebijakan		
Kualitas poster dan presentasi		
Kemampuan menjawab pertanyaan panel		

■ Lampiran B. Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Unsur	Isian
Nama / NIM (atau nama kelompok)	
Judul tugas	
Mata kuliah	Sosiologi Pemerintahan (3KKFS052)

menyatakan bahwa tugas ini merupakan karya saya/kami sendiri. Seluruh data lapangan dan sekunder bersumber dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa fabrikasi. Penggunaan GenAI dalam tugas ini adalah sebagai berikut:

Nama alat GenAI	Tujuan penggunaan	Bagian tugas yang dibantu	Cara verifikasi

☐ Saya/kami tidak menggunakan GenAI dalam tugas ini.

☐ Seluruh keluaran GenAI telah saya/kami periksa dan verifikasi terhadap sumber primer.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran integritas akademik, termasuk fabrikasi data lapangan, saya/kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, ...

(.....)

■ Lampiran C. Kuesioner Umpan Balik Modul

Berilah tanda centang pada skor yang sesuai: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Capaian pembelajaran setiap unit dinyatakan dengan jelas.					
2	Uraian konsep dan perspektif teoretis sosiologi pemerintahan mudah dipahami.					
3	Studi kasus membantu saya menerapkan teori pada gejala pemerintahan nyata.					
4	Kegiatan lapangan membantu saya memahami demokrasi akar rumput.					
5	Latihan dan kunci jawaban membantu saya mengukur penguasaan.					
6	Final Project meningkatkan kemampuan saya menganalisis dinamika pemerintahan lokal secara terpadu.					
7	Pembagian tugas individu dan kelompok adil.					
8	Rubrik dan sistem penilaian transparan.					
9	Tampilan dan tata letak modul memudahkan belajar.					
10	Secara keseluruhan modul ini bermanfaat.					

Pertanyaan terbuka

1. Bagian modul yang paling membantu:

.....

2. Bagian modul yang perlu diperbaiki:

.....

3. Saran untuk edisi berikutnya:

.....